



DEPARTEMEN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# STRATEGI

P E R T A H A N A N N E G A R A







**DEPARTEMEN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**DEPARTEMEN PERTAHANAN RI**

---

---

Copyright © 2007, Departemen Pertahanan Republik Indonesia  
ISBN 978-979-8878-02-2

---

**Strategi Pertahanan Negara**



DEPARTEMEN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : Per/22/M/XII/2007

TENTANG

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri;
- b. bahwa pertahanan negara perlu dilaksanakan dengan strategi pertahanan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, perlu diterbitkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Pertahanan Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : Per/01/M/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
TENTANG STRATEGI PERTAHANAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 1**

Mengesahkan Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

**Pasal 2**

Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini wajib

dipedomani dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini, maka Strategi Pertahanan Negara yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Pertahanan ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Desember 2007

---

MENTERI PERTAHANAN,



JUWONO SUDARSONO



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, buku "Strategi Pertahanan Negara" yang merupakan salah satu dari produk-produk strategis di bidang pertahanan telah dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini didorong oleh adanya perkembangan geopolitik internasional yang berlangsung cepat dan kompleks, sebagai fenomena global yang mempengaruhi berbagai perubahan dalam aspek kehidupan. Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut berimplikasi terhadap situasi keamanan yang perlu penanganan lebih komprehensif. Bagi Indonesia, hal tersebut mendorong untuk menata kembali konsep pertahanannya menjadi *responsive* dan *adaptable* sebagaimana yang dikehendaki dalam reformasi di bidang pertahanan. Sehingga strategi pertahanan negara tersebut harus mampu menjawab tiga hal yang mendasar, yakni apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya.

Selain itu, penyusunan buku ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman dasar untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran bagi setiap warga Negara, serta pedoman kerja bagi aparat pertahanan dan TNI mengenai strategi penyelenggaraan pertahanan Negara. Tujuannya adalah agar terselenggaranya substansi sasaran strategis yang mencakup sasaran di bidang penangkalan, sasaran dalam menghadapi ancaman agresi militer, sasaran dalam mengatasi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, sasaran di bidang

penangkalan, sasaran untuk mengatasi ancaman nirmiliter, serta sasaran dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Saya selaku pimpinan Departemen Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena, atas bimbingan dan petunjuk-Nya penyusunan buku ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyiapan buku sebagai salah satu dari produk-produk strategis. Saya yakin, peran serta tersebut merupakan Dharma Bhakti bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang kita banggakan dan cintai bersama.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, 28 Desember 2007

Menteri Pertahanan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juwono Sudarsono', written in a cursive style.

Juwono Sudarsono



# DAFTAR ISI

<b>LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>LANDASAN.....</b>	<b>5</b>
Landasan Idiil .....	5
Landasan Konstitusional .....	5
Landasan Yuridis.....	7
Landasan Historis.....	8
Landasan Visional .....	9
Landasan Konseptual .....	10
Landasan Doktrinal .....	10
<b>BAGAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA .....</b>	<b>11</b>
<b>KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN</b>	
<b>STRATEGIS .....</b>	<b>12</b>
Lingkungan Strategis Global.....	12
Terorisme dan Pola Penanganan Global .....	13
Isu Senjata Pemusnah Massal.....	14
Isu Kelangkaan Energi .....	14
Ancaman Keamanan Lintas Negara .....	15
Dampak Pemanasan Global .....	15
Bencana Alam .....	16
Lingkungan Strategis Regional .....	17
Konflik Eksternal dan Internal di Kawasan.....	17



Keamanan Maritim.....	18
Keamanan Dirgantara .....	19
<b>KONDISI DALAM NEGERI.....</b>	<b>21</b>
Nasional .....	21
Isu Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.....	21
Isu Separatisme.....	22
Isu Terorisme .....	24
Isu Konflik Komunal .....	24
Isu Radikalisme yang Anarkis .....	25
Isu Politik.....	25
Provinsial .....	26
Lokal.....	28
<b>PENGGOLONGAN ANCAMAN.....</b>	<b>30</b>
Ancaman Militer .....	30
Agresi Militer .....	30
Pelanggaran Wilayah.....	32
Gerakan Separatisme.....	33
Pemberontakan Bersenjata.....	33
Pengamanan Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis .....	34
Kegiatan Spionase .....	35
Ancaman Terorisme .....	35
Gangguan Keamanan di Laut dan Gangguan Keamanan di Udara .....	36
Konflik Komunal.....	37
Ancaman Nirmiliter.....	38
<b>SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>47</b>
Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Menangkal segala Bentuk	



Ancaman dan Gangguan yang Membahayakan Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan seluruh Bangsa Indonesia.	47
Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Menghadapi Perang dari agresi militer oleh Negara Asing .....	48
Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Menanggulangi Ancaman Militer yang Mengganggu Eksistensi dan Kepentingan NKRI .....	49
Terselenggaranya Pertahanan Negara dalam Menangani Ancaman Nirmiliter yang Berimplikasi terhadap Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan Bangsa Indonesia.....	49
Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional.....	50
<b>KONSEP UMUM STRATEGI PERTAHANAN NEGARA.....</b>	<b>52</b>
Pertahanan Berlapis .....	52
Penangkalan.....	53
Menghadapi Ancaman Militer .....	54
Menghadapi Ancaman Nirmiliter .....	56
<b>PENANGKALAN .....</b>	<b>58</b>
Prinsip Dasar Penangkalan.....	58
Instrumen Penangkalan.....	59
Instrumen Politik .....	59
Instrumen Ekonomi .....	60
Instrumen Psikologis.....	62
Instrumen Teknologi .....	63
Instrumen Militer .....	63
Pendekatan Strategi Penangkalan.....	64
Penangkalan dengan Cara Penolakan .....	64



Penangkalan dengan Cara Pembalasan.....	66
Pilihan Strategis .....	67
Formulasi Strategi Penangkalan.....	69
Pertahanan Militer.....	69
Pertahanan Nirmiliter .....	71
<b>MENGHADAPI ANCAMAN MILITER.....</b>	<b>73</b>
Menghadapi Agresi Militer .....	73
Lapis Diplomasi .....	74
Lapis Perlawanan Rakyat secara Spontan .....	75
Lapis Pertahanan Militer .....	76
Lapis Pertahanan untuk Perang Berlarut .....	78
Menghadapi Ancaman Militer Berbentuk Bukan Agresi .....	79
Menangani Pelanggaran Wilayah.....	80
Mengatasi Gerakan Separatisme .....	82
Mengatasi Pemberontakan Bersenjata .....	83
Menangani Sabotase.....	84
Menangani Aksi Spionase .....	85
Menangani Ancaman Terorisme .....	86
Menangani Ancaman Keamanan Laut.....	88
Menangani Ancaman Keamanan Dirgantara .....	90
Menangani Konflik Komunal.....	91
Tugas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.....	93
Pengamanan Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis .....	94
<b>PENANGANAN ANCAMAN NIRMILITER YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PERTAHANAN NEGARA MELALUI PERAN LINTAS LEMBAGA.....</b>	<b>96</b>



Menghadapi Ancaman Berdimensi Ideologi .....	97
Menghadapi Ancaman Berdimensi Politik .....	98
Menghadapi Ancaman Berdimensi Ekonomi.....	102
Menghadapi Ancaman Berdimensi Sosial Budaya .....	105
Menghadapi Ancaman Berdimensi Berbasis Teknologi dan Informasi.	108
Menghadapi Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum .....	109
Tugas Perbantuan TNI.....	111
Tugas TNI dalam Pemberdayaan Wilayah Negara .....	111
Bantuan TNI pada Tugas Pemerintahan di Daerah.....	112
Bantuan TNI kepada Kepolisian Negara .....	113
Bantuan TNI dalam Pengamanan Tamu Negara .....	114
Bantuan TNI Dalam Pencarian dan Pertolongan (SAR).....	114

## **KERJA SAMA PERTAHANAN DAN PERDAMAIAN DUNIA..... 116**

Lingkup dan Esensi Kerja Sama Pertahanan .....	116
Paradigma Kerja Sama Pertahanan .....	117
Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional.....	118

## **PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA..... 122**

Pokok-Pokok Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara .....	122
Sasaran Pembinaan Kemampuan Pertahanan Militer .....	124
Kemampuan Intelijen.....	125
Kemampuan Pertahanan .....	126
Kemampuan Keamanan.....	126
Kemampuan Dukungan .....	127
Kemampuan Pemberdayaan Wilayah .....	128
Sasaran Pembinaan Kemampuan Pertahanan Nirmiliter .....	129
Pembinaan Sumber Daya Manusia .....	130



# DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

---

---

Pembinaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan .....	131
Pembinaan Sarana dan Prasarana .....	131
Pembinaan Wilayah.....	132
Pembinaan Faktor-Faktor Nonfisik .....	133
<b>PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
Perlakuan .....	135
Petunjuk Akhir .....	135



## LATAR BELAKANG

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan fenomena global yang mempengaruhi gelombang perubahan di Abad XXI. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap tata kehidupan masyarakat dan hubungan antarnegara yang sangat dinamis. Globalisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mendorong semakin ketatnya kompetisi antarbangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut berimplikasi terhadap perubahan situasi keamanan dan konteks strategis dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan lebih komprehensif. Perubahan tersebut juga turut mendorong negara-negara di dunia untuk menata kembali konsep pertahanannya menjadi lebih responsif dan adaptabel.

Sementara itu, pada lingkup nasional, di tengah berlangsungnya globalisasi yang mempengaruhi dinamika lingkungan strategis, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah isu keamanan nasional dengan karakteristik ancaman yang kompleks serta permasalahan yang beragam. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki karakteristik, yaitu terdiri atas rangkaian kepulauan Nusantara dengan wilayah perairan daratan dan udara yang terbentang sangat luas, yang memerlukan sosok pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi. Pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi harus ditopang oleh strategi pertahanan negara yang tepat dan kontekstual sehingga mampu memaksimalkan pendayagunaan segenap sumber daya nasional dalam memelihara kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara.



Strategi pertahanan yang tepat harus mampu menjawab tiga pertanyaan penuntun yang mendasar, yaitu *apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya.*

Esensi penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam wadah NKRI. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Agar dapat menjamin tetap tegaknya NKRI sekaligus mampu merespons tantangan pertahanan negara ke depan, maka pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan Semesta dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam konteks tersebut strategi pertahanan negara dikembangkan dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling menyokong. Strategi Pertahanan Berlapis merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Implementasi dari Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan dalam lapis pertahanan militer dengan TNI sebagai inti kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman militer serta disokong oleh lapis pertahanan nirmiliter yang menyelenggarakan fungsi-fungsi diplomasi, ekonomi, psikologi, teknologi dan informasi serta keselamatan umum. Keterpaduan antara pertahanan militer dan



pertahanan nirmiliter menghasilkan daya tangkal yang mampu mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Daya tangkal bangsa melalui Strategi Pertahanan Berlapis bertumpu pada kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional, serta disegani, mampu melaksanakan operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP), disokong oleh kapabilitas pertahanan nirmiliter yang manunggal dengan TNI. Sokongan pertahanan nirmiliter dalam pertahanan negara diwujudkan dalam pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat yang berkeadilan serta merefleksikan kemampuan diplomasi dengan posisi tawar yang tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing, faktor psikologi bangsa yang memancarkan nasionalisme yang tinggi dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta penguasaan iptek untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Peran pertahanan nirmiliter diselenggarakan melalui upaya diplomasi sebagai lini depan pertahanan, serta diperkuat oleh peran rakyat melalui kekuatan politik, ekonomi, psikologi, informasi, dan teknologi.

Perang berlarut pada hakikatnya kelanjutan upaya pertahanan negara dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI ketika pelaksanaan OMP tidak mencapai kesuksesan. Perang berlarut merupakan pengejawantahan dari prinsip bangsa Indonesia yang pantang menyerah dan rela berkorban dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, serta wujud dari komitmen bangsa Indonesia dalam membela harkat dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perang berlarut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh bangsa Indonesia, baik militer maupun nirmiliter yang diletakkan di atas kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pertahanan negara.

Keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dapat



pula diwujudkan dalam kondisi tatkala negara menghadapi ancaman nirmiliter yang diduga dapat berdampak mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Spektrum ancaman nirmiliter dapat dikelompokkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Ancaman nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer sehingga memerlukan pola penanganan dan pendekatan yang disesuaikan dengan sifat dan bentuk ancaman. Dalam hal ini fungsi pertahanan nirmiliter, yakni departemen dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan, merupakan unsur utama, yang dibantu oleh fungsi pertahanan militer, yakni TNI dan segenap unsur masyarakat.

Mencermati kecenderungan yang terjadi pada abad ke 21, maka ke depan diperkirakan ancaman nirmiliter akan makin mengemuka dan menjadi ancaman nyata yang tidak kalah dahsyatnya dengan ancaman militer. Praktik-praktik hegemoni, tekanan ekonomi dan politik, serta penggunaan teknologi dan informasi, dan nilai-nilai sosial budaya untuk menguasai negara lain, diperkirakan akan menjadi bentuk-bentuk ancaman nirmiliter yang dihadapi di masa mendatang. Di samping itu, ancaman nirmiliter dapat pula berupa wabah penyakit pandemik, peredaran Narkotik dan obat-obatan terlarang (Narkoba), serta bencana alam yang mengancam negara pada waktu-waktu yang akan datang.

Dalam menghadapi karakteristik ancaman seperti digambarkan di atas, pertahanan Indonesia disusun dalam Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Dengan Strategi Pertahanan Berlapis diyakini bangsa Indonesia memiliki daya tangkal yang tinggi dan berdaya saing serta mampu mengatasi setiap ancaman yang datang, baik dari luar maupun dari dalam negeri.



## LANDASAN

### **Landasan Idiil**

Landasan idiil Strategi Pertahanan Negara adalah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya untuk menjadi pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan berdaya saing.

### **Landasan Konstitusional**

Landasan konstitusional Strategi Pertahanan Negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, di antaranya, pandangan bangsa Indonesia



dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. UUD 1945 merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Upaya penindasan dan penjajahan akan selalu ditentang dan dicegah oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

UUD 1945 menetapkan sistem pertahanan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran vital yang dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Maknanya adalah bahwa rakyat merupakan komponen utama. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yaitu melalui profesinya masing-masing dalam kehidupan bernegara yang akan memberi kontribusi terhadap pertahanan negara atau menjadi prajurit wajib.

Hal mendasar yang terkait dengan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara adalah bahwa negara dapat mewajibkan setiap warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara. Mewajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara adalah konteks yang konstitusional sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara yang berdaulat. Namun, diwajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945.



## Landasan Yuridis

Landasan yuridis Strategi Pertahanan Negara adalah UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang tersebut mengatur, antara lain, penyelenggaraan, pengelolaan sistem, dan pembinaan kemampuan pertahanan negara.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara.

UU RI Nomor 3 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Sistem Pertahanan Semesta dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama serta segenap sumber daya nasional lainnya, sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, Sistem Pertahanan Semesta menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Dengan demikian, dalam menghadapi ancaman nirmiliter, TNI menjadi salah satu unsur pendukung.



## Landasan Historis

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan sarat dengan nilai-nilai heroik, patriotik, dan nasionalisme yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Identitas tersebut teraktualisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari dalam wujud persaudaraan, gotong-royong, keuletan, ketangguhan, percaya akan kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah, keyakinan meraih kemenangan, serta rela berkorban demi kebenaran dan keadilan.

Perjuangan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat adalah perjuangan panjang yang pantang menyerah. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit sampai dengan saat ini, nilai-nilai kesatuan dan persatuan, kebangsaan, patriotisme, serta heroik telah tertanam dan berkembang menjadi jati diri. Jati diri tersebut menjadi instrumen pemersatu bangsa Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan.

Perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti hingga mencapai kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa setelah merebut kemerdekaannya, Indonesia menghadapi ancaman dan rongrongan yang dahsyat dari bangsa lain dan dari pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun, berkat rahmat serta tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mampu melampaui





setiap ancaman dan tantangan itu sehingga NKRI tetap dapat berdiri tegak. Keberhasilan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI disebabkan oleh kesamaan tekad bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam wadah NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil usaha bersama dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal ini membuktikan bahwa ketika Indonesia bersatu padu, tujuan bersama akan dapat diraih. Sebaliknya, apabila bangsa Indonesia bercerai-berai, Indonesia akan mudah dihancurkan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan harus dikelola sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa Indonesia.

Dari pengalaman sejarah tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa nilai-nilai perjuangan terlahir dari kesadaran sebagai bangsa yang bermartabat untuk menentukan nasib sendiri. Substansi nilai-nilai tersebut menjelma dalam hak dan kewajiban warga negara yang mendasari konsep pertahanan negara yang disusun dalam Sistem Pertahanan Semesta.

### **Landasan Visional**

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia tempat wilayah Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah dan sarana membangun serta menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah



Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan.

### **Landasan Konseptual**

Ketahanan Nasional merupakan geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari konsep geopolitik Wawasan Nusantara dalam mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan regional dan supraregional. Ketahanan Nasional pada hakikatnya berisi keuletan serta ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan nasional yang harus dipersiapkan dan dibangun sehingga menghasilkan suatu kondisi yang dinamis dan kondusif dalam mewujudkan daya tangkal bangsa.

### **Landasan Doktrinal**

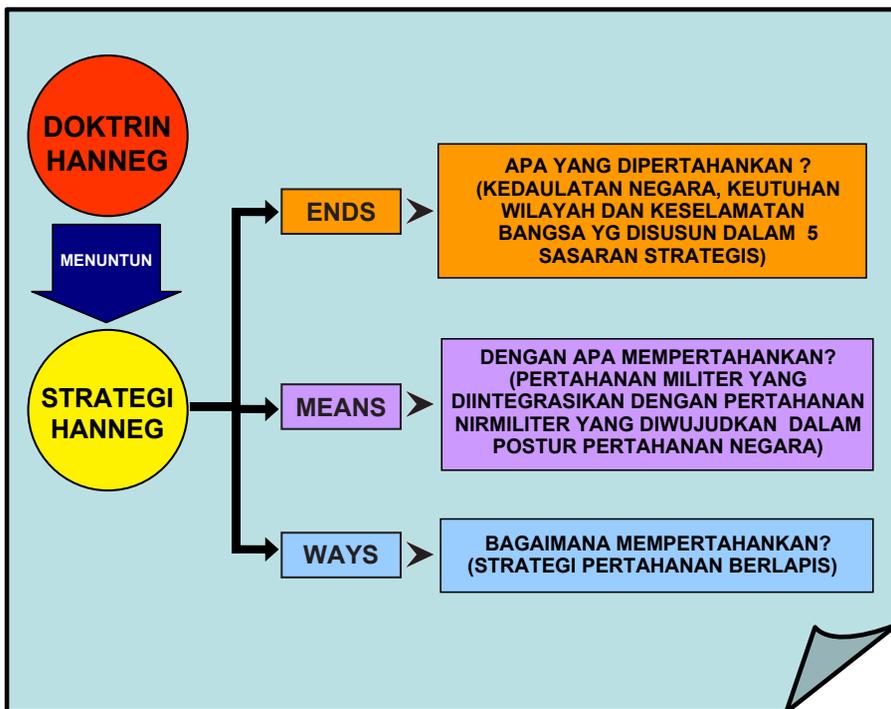
Landasan doktrinal Strategi Pertahanan Negara adalah Doktrin Pertahanan Negara. Doktrin Pertahanan Negara berisi ajaran serta prinsip-prinsip fundamental yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia serta dalam mengelola perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional. Ajaran dan prinsip fundamental dimaksud menuntun bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pertahanan negara.

Dalam mengembangkan strategi pertahanan negara, Doktrin Pertahanan Negara menempati posisi yang sangat fundamental. Posisi doktrin tersebut menuntun pengembangan strategi pertahanan negara



dalam merumuskan tiga substansi dasar strategi pertahanan, yang meliputi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya yang digunakan (*means*), serta cara mencapai tujuan (*ways*) seperti yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

## BAGAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA





## **KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun kondisi dalam negeri. Esensi dari analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis adalah menentukan dugaan ancaman terhadap pertahanan negara. Dugaan ancaman tersebut menjadi dasar dalam pemilihan strategi pertahanan.

### **Lingkungan Strategis Global**

Bagi masyarakat internasional, isu global seperti halnya isu tentang penguatan nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup masih menjadi fokus perhatian. Penanganan terhadap isu-isu global tersebut seringkali dijadikan salah satu tolok ukur dalam pengembangan hubungan antarnegara, baik dalam skala bilateral maupun yang lebih luas. Isu tersebut bahkan sering pula dijadikan ukuran dalam membangun kerja sama pertahanan antarnegara.

Kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Isu keamanan tersebut, antara lain, adalah terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya isu-isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan teknologi



informasi, penguatan identitas primordial, dan peran aktor non-negara, dan bagi negara-negara berkembang, isu keamanan baru banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang kebanyakan masih terbelakang, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.

### *Terorisme dan Pola Penanganan Global*

Pasca-Tragedi 11 September 2001 terjadi pergeseran dan perubahan paradigma keamanan global. Terorisme menjadi ancaman nyata yang sangat mengemuka sehingga konsep-konsep keamanan di setiap negara mengalami



perubahan secara mendasar dari konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional kepada konsep keamanan baru yang lebih komprehensif. Penanganan terorisme juga mempengaruhi hubungan antarnegara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.

Dalam perspektif strategi pertahanan, isu terorisme membawa beberapa implikasi. Pertama, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengancam jiwa manusia dan mengancam seluruh negara. Kedua, sebagai ancaman nyata, isu terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan dimana aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut kesiapsiagaan yang prima. Ketiga, penanganan terorisme memaksa adanya peningkatan kerja sama pertahanan menjadi lebih intensif dan progresif. Keempat, penanganan terorisme dengan menggunakan



kekuatan militer menjadi salah satu pilihan strategi pertahanan sehingga harus ada aturan yang jelas agar tidak berbenturan dengan norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia.

### *Isu Senjata Pemusnah Massal*

Pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal telah menjadi salah satu isu utama keamanan global. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia, mengancam keamanan dunia dan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia. Kemajuan iptek yang cukup pesat dan mengglobal membawa efek semakin mudah pula bagi manusia menemukan formula atau cara melakukan proliferasi senjata pemusnah massal. Senjata nuklir yang dimiliki sejumlah negara di dunia menghadirkan kekhawatiran tersendiri akan bahaya kehancuran besar yang akan melanda dunia jika senjata nuklir tersebut disalahgunakan.

### *Isu Kelangkaan Energi*

Perkembangan lingkungan strategis juga diwarnai oleh isu kelangkaan energi. Kebutuhan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Implikasinya berdampak terhadap perekonomian, politik, dan keamanan global.

Meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber minyak dan gas merupakan kondisi paradoksal yang mendorong timbulnya persaingan antarnegara dalam penguasaan sumber energi di berbagai



kawasan. Dengan mengingat bahwa sumber minyak dan gas sebagian besar terdapat di negara berkembang, ke depan negara berkembang tersebut akan menjadi pihak yang paling banyak merasakan dampaknya.

### *Ancaman Keamanan Lintas Negara*

Kondisi keamanan global diwarnai oleh meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara. Aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan merupakan bentuk ancaman keamanan lintas negara yang paling menonjol.

Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas negara tersebut telah mempengaruhi kondisi keamanan global sehingga isu-isu tersebut menjadi isu keamanan bersama yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh. Indonesia, dengan garis pantai yang sangat panjang, sangat rawan dengan ancaman keamanan lintas negara, seperti perompakan, penyelundupan narkotika dan obat terlarang (Narkoba), penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan manusia, dan pembalakan hutan secara liar yang diselundupkan melalui laut. Ancaman keamanan lintas negara tersebut telah sangat merugikan Indonesia dari segi ekonomi dan dari segi kehormatan bangsa.

### *Dampak Pemanasan Global*

Pemanasan global merupakan salah satu fenomena baru yang dihadapi umat manusia. Pemanasan global dan dampak yang



ditimbulkannya dapat mengubah geostrategi atau lanskap suatu negara atau kawasan. Terjadinya perubahan geostrategi dan lanskap juga berimplikasi terhadap perubahan pada persepsi ancaman.

Pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu; di satu sisi terdapat wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan yang serius, seperti kelangkaan air bersih serta mempengaruhi hasil pertanian; di sisi lain terdapat wilayah-wilayah yang mengalami curah hujan berlebihan sehingga mengakibatkan bahaya banjir yang serius yang mengancam harta milik dan pertanian. Kondisi tersebut membawa dampak yang serius terhadap kehidupan manusia, antara lain terjadinya kelaparan, kemiskinan, kelangkaan sumber daya air, gangguan kesehatan, serta menimbulkan bencana alam. Fenomena global tersebut, apabila tidak dapat ditangani secara baik, akan berdampak makin luas sehingga dapat menjadi isu keamanan yang serius dan melanda bangsa-bangsa di dunia. Indonesia yang wilayahnya di garis khatulistiwa sangat merasakan dampak pemanasan global tersebut, yang menyebabkan permukaan air laut menaik secara signifikan dan mengakibatkan beberapa pulau di Indonesia terancam tenggelam.

### *Bencana Alam*

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat telah membawa implikasi terhadap degradasi lingkungan hidup. Salah satu dampaknya berupa bencana alam yang melanda sejumlah negara yang menimbulkan kerusakan dahsyat terhadap infrastruktur dan harta benda serta menelan korban jiwa yang cukup besar. Posisi geografis dan geologi Indonesia yang terletak di cincin gunung api pertemuan sejumlah lapisan kerak bumi serta beriklim tropis sangat rawan terhadap bencana alam berupa gempa vulkanik dan tektonik, banjir, serta tanah longsor.



Bencana alam dalam skala besar bukan hanya akan membawa korban jiwa dan harta benda melainkan juga akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, terutama dalam layanan kepada masyarakat. Situasi demikian akan rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang pada skala tertentu akan membawa dampak negatif pada penyelenggaraan pertahanan negara secara keseluruhan.

### **Lingkungan Strategis Regional**

Isu keamanan regional masih diliputi oleh konflik potensial, seperti klaim teritorial dan ketegangan militer peninggalan era tersebut. Konflik potensial tersebut dalam derajat tertentu menimbulkan krisis yang mengancam stabilitas keamanan kawasan dan Indonesia. Meskipun secara geografis terjadi jauh dari wilayah Indonesia, beberapa krisis di antaranya membawa dampak terhadap Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal serta pada skala terbatas muncul klaim teritorial sebagai akibat permasalahan perbatasan antarnegara yang tak kunjung selesai.

#### *Konflik Eksternal dan Internal di Kawasan*

Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antarnegara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol, antara lain perselisihan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, kasus Cina-Taiwan, serta klaim tumpang tindih perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara.



Selain potensi konflik antarnegara, isu menonjol lain adalah konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal yang masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, di antaranya ancaman separatisme, konflik komunal yang berbasis suku, agama, ras dan antargolongan, serta ancaman kelompok radikal yang anarkis. Dampak dari konflik-konflik di suatu negara dapat menjalar ke negara lain dan berkembang menjadi ancaman keamanan nasional. Konflik internal yang terjadi di Timor Leste menghasilkan dampak yang menjalar ke wilayah Indonesia dalam bentuk gelombang pengungsian yang besar serta pelintas batas yang ilegal. Ancaman keamanan lintas negara seperti penyelundupan senjata dan bahan peledak pada umumnya merupakan dampak yang dihasilkan oleh konflik antarnegara atau konflik internal di kawasan.

### *Keamanan Maritim*

Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol yang mendapat perhatian pada Abad XXI. Fungsi wilayah maritim yang makin strategis dalam kepentingan negara-negara di dunia mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanannya.



Di kawasan Asia Tenggara, wilayah Selat Malaka menjadi fokus masyarakat internasional karena lalu-lintas transportasi perdagangan dunia paling padat melalui Selat Malaka. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara besar untuk ikut berperan



langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keinginan negara besar tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa-masa datang.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, di satu sisi mempunyai posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengamankannya. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global, yakni di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. ALKI serta *choke points* tersebut merupakan bagian wilayah yang rawan terhadap ancaman keamanan maritim, terutama perompakan bersenjata.

### *Keamanan Dirgantara*

Sejak 11 September 2001, keamanan dirgantara semakin mendapat perhatian masyarakat internasional. Aspek keamanan dirgantara mencakupi pengendalian wilayah dirgantara, kepentingan navigasi dan transportasi udara serta penggunaan wilayah udara untuk kepentingan pertahanan, baik sebagai wadah untuk latihan militer maupun sebagai wadah strategi pertahanan dalam melakukan kegiatan penginderaan dini untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman.

Kemajuan teknologi yang demikian pesat mempengaruhi pengelolaan wilayah dirgantara suatu bangsa yang menjadi semakin kompleks. Negara-negara maju dalam mengendalikan wilayah dirgantaranya acap kali memasuki wilayah negara lain, terutama melalui penggunaan radar berkemampuan jarak jauh atau alat deteksi untuk



mengendalikan wilayah pertahanan udara. Sistem peralatan tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dimanfaatkan bagi tujuan pertahanan sehingga berpotensi untuk mengancam kedaulatan suatu negara.

Bagi Indonesia, keamanan wilayah dirgantara mempunyai nilai vital dalam strategi pertahanan negara. Posisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara, serta berada pada salah satu wilayah pelintasan transportasi dunia, membawa implikasi terhadap potensi pelanggaran wilayah udara yang cukup tinggi. Pelanggaran wilayah udara oleh suatu negara merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara sehingga menjadi ranah fungsi pertahanan negara.



## KONDISI DALAM NEGERI

### Nasional

Indonesia dengan wilayah yang sangat luas serta terdiri atas pulau-pulau menuntut strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Karakteristik geografi yang tersusun dari gugusan kepulauan yang terletak di posisi silang, dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, serta demografi yang majemuk mengandung tantangan yang sangat kompleks. Tugas melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik yang demikian mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal andal.

Dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu yang menonjol, di antaranya isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, konflik komunal yang bernuansa SARA, gerakan radikal yang anarkis, serta isu politik sebagai akibat dari reformasi yang tidak terkendali.

#### *Isu Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*

Isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar cukup beragam dan kompleks, di antaranya menyangkut eksistensi, status kepemilikan, konversi lingkungan, pengamanan, dan pengawasannya. Indonesia dengan beberapa negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan



darat maupun laut yang hingga kini belum tuntas. Masalah perbatasan yang belum selesai menjadi sumber potensi ancaman pertahanan yang berpotensi konflik bersenjata di masa mendatang. Persoalan perbatasan yang belum tuntas tersebut di antaranya perbatasan darat dengan dan perbedaan rezim laut dengan Malaysia, batas laut dengan Singapura, penetapan batas ZEE dengan Thailand yakni di perairan selatan Laut Andaman, perbatasan laut dengan Filipina, batas ZEE dengan Palau, serta batas laut antara Indonesia Timor Leste dan Australia setelah kemerdekaan Timor Leste. Dari semua isu perbatasan, wilayah Ambalat yang diklaim oleh Malaysia serta sepuluh titik yang masih bermasalah di Kalimantan merupakan "titik api" yang ke depan berpotensi menjadi sumber sengketa. Demikian pula, persoalan yang terkait dengan pulau terluar, seperti pengerukan pasir di Pulau Nipah dan sekitarnya, menjadi masalah serius karena terkait eksistensi pulau terluar yang makin kritis. Eksistensi pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia, yakni berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar rawan terhadap tindakan diperjualbelikan atau disewakan secara tidak sah kepada pihak lain atau warga negara asing. Dari beberapa kasus ditemukan beberapa pulau kecil yang dikelola oleh perseorangan, bahkan ada pulau-pulau milik Indonesia yang dikelola oleh pihak asing.

### *Isu Separatisme*

Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam wibawa pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatis di



Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik serta gerakan separatis bersenjata. Hingga kini masih terdapat potensi gerakan separatis di beberapa wilayah yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Bangsa Indonesia menyadari dan memiliki komitmen bahwa berada dalam wadah NKRI merupakan putusan politik yang tepat dan final. Oleh karena itu, separatisme menjadi ancaman langsung terhadap keutuhan wilayah NKRI. Pengalaman Indonesia membuktikan bahwa gerakan separatisme menjadi ancaman yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Gerakan separatisme juga menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, tidak saja mengancam keamanan dan keselamatan negara tetapi juga terhadap keselamatan umum masyarakat dengan melakukan perampokan, pembunuhan, dan penarikan pajak secara paksa. Adanya kelompok separatis di beberapa wilayah Indonesia merupakan bibit-bibit potensi ancaman yang selalu akan mengancam keutuhan wilayah NKRI, terlebih lagi karena akar masalah separatisme banyak dipicu oleh ketimpangan pada pemberian hak politik, ekonomi, serta keadilan kepada masyarakat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat untuk berada dalam naungan NKRI akan terus menjadi potensi separatisme.



### *Isu Terorisme*

Terorisme merupakan salah satu ancaman nyata yang dihadapi Indonesia. Aksi-aksi yang dilakukan teroris telah mengancam keselamatan bangsa Indonesia serta mengancam kepentingan nasional Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Bom Bali I dan bom Bali II, pengeboman di depan Kedutaan Australia di Jakarta, dan peledakan di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, telah menyebabkan kerugian tidak saja berupa korban manusia dan harta benda tetapi juga mengancam perekonomian dan pariwisata Indonesia. Dari aksi-aksi terorisme tersebut, terbukti bahwa Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi jaringan terorisme internasional. Pola kegiatan para pelaku aksi terorisme membuktikan bahwa jaringan terorisme internasional berusaha melakukan perekrutan anggota dari masyarakat Indonesia.

Bagi Indonesia aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dari berbagai kasus terorisme juga terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional sekaligus domestik (intermestik).

### *Isu Konflik Komunal*

Demografi Indonesia yang sangat heterogen berimplikasi terhadap potensi konflik yang berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan. Di masa lalu Indonesia pernah mengalami beberapa konflik komunal yang terjadi di beberapa wilayah, seperti yang



terjadi di Kalimantan, Ambon dan Maluku Utara, serta Poso. Konflik komunal mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi sumber ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Demografi Indonesia yang heterogen serta masyarakatnya yang memiliki masalah dari berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam hubungan kelompok atau golongan, sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi penggerak konflik komunal. Di samping itu, berkembangnya ajaran sesat di sejumlah wilayah yang mendapat penentangan keras dari masyarakat akan menjadi pendorong timbulnya konflik komunal di masa-masa datang.

### *Isu Radikalisme yang Anarkis*

Penanganan isu-isu global secara unilateral atau tidak seimbang sering menjadi pendorong bangkitnya gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme selalu mengganggu stabilitas keamanan sehingga perlu penanganan secara serius menurut hukum, tanpa diskriminasi. Gerakan radikal berpotensi mengganggu kepentingan publik, baik masyarakat domestik maupun internasional. Oleh karena itu, penanganannya sangat mendesak. Apabila penanganannya tidak serius, hal tersebut tidak saja merugikan citra bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk kekuatan asing.

### *Isu Politik*

Perkembangan politik sampai dengan era Reformasi banyak mengalami perubahan dan cenderung mengarah kepada



ketidakpastian. Demokrasi yang berkembang seluas-luasnya belum diikuti dengan pengetahuan, kesiapan, dan kedewasaan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Nuansa kebebasan ditandai dengan terbukanya keran politik yang semakin terbuka lebar serta kontrol politik dari masyarakat yang cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas.

Proses demokrasi harus dipelihara dengan terus membangun dan memberdayakan instrumen-instrumen demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik di tingkat masyarakat dan seluruh pelaku politik perlu ditingkatkan sehingga terciptanya kedewasaan dan budaya politik yang semakin terarah dan maju.

### **Provinsial**

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk percepatan dan pembangunan di daerah. Penerapan secara serentak dan menyeluruh tidak diikuti dengan kesiapan daerah



sehingga menimbulkan sejumlah isu, antara lain, terkait dengan isu otonomi khusus, ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa, dan tata ruang wilayah. Dalam pelaksanaan pemekaran daerah, sering menjadi komoditas politik yang memicu persoalan politik, demikian pula dengan kegagalan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah, kesemuanya itu mendorong konflik konflik vertikal



dan konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, sejumlah daerah berusaha menuntut pemerintah pusat untuk memberikan status otonomi khusus. Status tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai hak untuk mengurus wilayah sendiri yang menyentuh bidang-bidang pemerintahan, hukum, agama, bahkan termasuk keamanan. Tuntutan tersebut apabila tidak dapat dikelola secara tepat dapat berkembang menjadi potensi konflik vertikal yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan Nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sementara daerah-daerah di luar Jawa mengalami ketimpangan yang cukup jauh. Sebagai akibatnya, Pulau Jawa menjadi sasaran urbanisasi dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan daya tampung dan tata ruang Pulau Jawa. Kondisi tersebut ikut menambah ketimpangan pembangunan di daerah-daerah dan pada skala tertentu dapat menjadi isu stabilitas nasional.

Isu lain yang juga cukup menonjol adalah mengenai tata ruang wilayah. Penataan ruang wilayah yang diterapkan dalam pembagian kawasan-kawasan pembangunan mengandung potensi permasalahan yang kompleks. Dengan mengingat isu tata ruang terkait dengan ruang hidup dan kegiatan masyarakat serta bersifat lintas instansi, diperlukan penanganan yang saksama untuk dapat mempertemukan semua kepentingan, tanpa timbul implikasi terhadap stabilitas nasional.



### Lokal

Pada tingkat lokal, gejala globalisasi semakin terasa dan telah menjangkau masyarakat yang berdomisili di pelosok. Kondisi tersebut telah mendorong terjadinya mobilitas penduduk, baik secara fisik, yakni melalui migrasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, maupun dalam wujud komunikasi antarmasyarakat yang makin mudah dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi yang makin menjangkau rakyat biasa dan bersifat ramah bagi pengguna. Perkembangan ini mendorong berlangsungnya pertukaran nilai secara serta-merta yang sulit dibendung dan cenderung mempercepat berkembangnya pola hidup modern dengan ciri kehidupan yang bebas dan praktis, yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

Hal lain yang juga menonjol adalah timbulnya penguatan identitas lokal sebagai respons masyarakat dalam menyikapi pemberlakuan otonomi daerah. Penguatan identitas lokal banyak dimunculkan dalam kemasan isu putra daerah, hak adat, dan hak ulayat. Kondisi yang berkembang seperti ini sangat kontraproduktif dengan prinsip bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Penguatan identitas lokal yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menyulut konflik horizontal yang berdimensi SARA. Tantangan yang tidak kalah signifikan adalah permasalahan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dalam konteks pertahanan, aspek ini berdimensi pertahanan nirmiliter yang memerlukan penanganan dengan pendekatan multisektoral dan integratif.

Bencana alam, selain menjadi tantangan yang berskala



nasional, juga memiliki dimensi lokal. Departemen dan lembaga teknis pemerintah, baik lembaga riset maupun perguruan tinggi, termasuk sumber dari luar negeri, memetakan bahwa hampir semua daerah di Indonesia rawan terhadap bencana alam dengan bentuk yang bervariasi, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kelangkaan sumber daya air, dan kebakaran hutan.



## PENGGOLONGAN ANCAMAN

### **Ancaman Militer**

Ancaman militer memiliki karakter yang beragam. Ancaman militer dapat berupa jenis ancaman yang sifatnya terorganisasi dengan menggunakan kekuatan bersenjata, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat pula berupa jenis ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara atau ancaman bersenjata yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Dari batasan tentang ancaman seperti diuraikan di atas, ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman militer yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut atau udara, serta perang saudara atau konflik komunal.

### *Agresi Militer*

Agresi militer dari suatu negara merupakan jenis ancaman yang ditempatkan paling utama dalam penggolongan ancaman yang membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Penempatan ancaman agresi pada tingkat paling tinggi berdasarkan pada pertimbangan kemungkinan



risiko yang ditimbulkannya, yakni mengancam struktur negara serta eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Agresi militer dari suatu negara bahkan dapat membubarkan suatu negara yang diagresi. Dari hasil analisis ancaman, dapat disimpulkan bahwa situasi global yang penuh dengan ketidakpastian, serta perkembangan ancaman yang makin kompleks sejak terorisme menjadi ancaman global, telah mengubah konsepsi dan strategi pertahanan negara yang lebih responsif. Kondisi tersebut mempengaruhi faktor-faktor yang mendorong terjadinya agresi menjadi semakin kompleks, serta semakin sulit untuk memprediksi kemungkinan agresi. Oleh karena itu, pertahanan negara harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghasilkan daya tangkal terhadap kemungkinan menghadapi ancaman yang terbesar yakni agresi.

Agresi militer mempunyai bentuk mulai dari yang berskala paling tinggi sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang rendah sampai dengan skala yang paling tinggi dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militer dari negara yang akan melakukan invasi. Puncaknya adalah pengerahan kekuatan militer untuk melakukan serangan. Untuk menghindari ancaman invasi, diperlukan langkah-langkah diplomatik yang efektif agar dapat mencegah terjadinya perang.

Agresi juga dapat berupa bombardemen melalui udara atau laut, blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah negara, dan dapat pula berbentuk serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara. Jenis-jenis ancaman tersebut dilakukan ke arah sasaran terpilih yang menjadi pusat kekuatan militer, seperti



instalasi peluru kendali, pusat objek vital nasional yang bernilai strategis, atau tempat lain yang diperkirakan menjadi sasaran teroris atau sarang milisi yang radikal.

Di samping bentuk-bentuk agresi seperti diuraikan di atas, terdapat pula beberapa bentuk lain agresi. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati merupakan salah satu bentuk agresi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI digolongkan ke dalam ancaman agresi. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI adalah pelanggaran kedaulatan negara yang dikategorikan sebagai bentuk agresi suatu negara.

### *Pelanggaran Wilayah*

Selain agresi, terdapat beberapa ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi, yakni tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan terbuka, maka Indonesia sangat rawan terhadap pelanggaran wilayah terutama laut dan udara yang dilakukan oleh negara lain. Posisi Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara, kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah cukup tinggi. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara.



### *Gerakan Separatisme*

Dari anatomi ancaman yang berdimensi separatisme, gerakan separatisme tersebut mengambil dua pola perjuangan, yakni gerakan separatisme tidak bersenjata dan gerakan separatisme bersenjata. Sejak Indonesia berdiri, gerakan separatisme yang terjadi di beberapa wilayah telah melakukan berbagai usaha untuk memisahkan diri.

Isu separatisme bagi Indonesia ditempatkan sebagai ancaman pertahanan karena gerakan separatisme mengancam secara langsung keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, penanganan ancaman tersebut ditempatkan cukup tinggi dan dengan strategi pertahanan yang disusun secara khusus, baik secara militer maupun nirmiliter. Sejalan dengan era globalisasi serta perkembangan nilai-nilai demokrasi, pihak-pihak tertentu telah berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan gerakannya untuk memisahkan diri.

Indonesia baru saja menyelesaikan konflik di Aceh dengan pendekatan politik dan penggunaan cara damai. Kondisi yang sudah terbina dengan baik di wilayah tersebut perlu dijaga bersama agar pembangunan di Aceh dapat diakselerasi. Sementara itu, di beberapa wilayah masih tampak adanya kelompok-kelompok tertentu yang masih berusaha memisahkan diri dari NKRI. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ancaman separatisme masih tetap diperhitungkan.

### *Pemberontakan Bersenjata*

Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam



negeri. Pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanannya bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DI/TII, Kahar Muzakar, serta G-30-S/PKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah tetapi juga mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pemberontakan bersenjata sebagai bentuk ancaman terhadap NKRI dalam beberapa dekade terakhir telah berkembang dalam bentuk gerakan separatisme yang pola perkembangannya seperti api dalam sekam. Gerakan radikal di masa lalu, serta sisa-sisa G-30-S/PKI, berhasil melakukan regenerasi dan telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan dengan memanfaatkan euforia Reformasi untuk masuk ke segala lini dan elemen nasional. Untuk menanggapi kecenderungan tersebut, diperlukan membangun suatu kewaspadaan nasional dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengikuti perkembangan regenerasi dan metamorfosis kelompok-kelompok yang diuraikan di atas.

### *Pengamanan Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis*

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi. Aksi-aksi sabotase tersebut, didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks.



Fungsi pertahanan negara dalam pengamanan objek vital memiliki lingkup pertahanan yang strategis. Setiap objek vital dalam konteks pertahanan negara menjadi sasaran ancaman militer dari luar. Dalam kerangka itu, pengamanan terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis adalah menyangkut penggelaran kekuatan untuk menimbulkan efek penangkalan terhadap ancaman militer yang membahayakan objek vital nasional tersebut. Dengan demikian, ranah pengaman objek vital tersebut sangat berbeda dengan ranah fungsi oleh instrumen keamanan yang lain.

### *Kegiatan Spionase*

Pada abad modern kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus dengan pendekatan kontra spionase untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan.

### *Ancaman Terorisme*

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada



dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan iptek. Ancaman terorisme berkembang secara meluas dan menjadi ancaman global. Aksi teror bersenjata terjadi di sejumlah negara. Ancaman terorisme tidak saja bersifat internasional dengan jaringan yang bersifat lintas negara, tetapi juga terdapat terorisme pada tingkat lokal. Ancaman terorisme pada tingkat lokal tersebut telah pula mengadopsi pola dan metode terorisme internasional, atau bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Dari sejumlah aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, tampak adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para aktor teroris untuk memperluas jaringan dengan membangun dan merekrut kader-kader baru.

Ancaman terorisme digolongkan ke dalam ancaman militer, karena terorisme mengancam keselamatan bangsa. Aksi terorisme yang tidak memandang atau memilih-milih target telah menjadi ancaman terhadap keselamatan bangsa yang perlu ditangani secara militer. Di samping itu aktor-aktor teroris memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus serta sudah mendapat pelatihan ala militer, sehingga perlu dihadapi pula dengan kekuatan militer. Aksi terorisme bahkan pula dapat menjadi bagian dari kampanye militer suatu negara atau pihak lain untuk menghancurkan Indonesia atau mengancam kredibilitas dan kepentingan nasional Indonesia.

### *Gangguan Keamanan di Laut dan di Udara*

Wilayah Indonesia yang sangat luas, dan terdiri atas gugusan



kepulauan Nusantara dengan dua pertiga dari luas wilayahnya merupakan wilayah laut, memiliki potensi terjadinya gangguan keamanan di laut dan gangguan keamanan di udara. Gangguan keamanan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang merongrong stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik oleh transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan di udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan antara lain pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, dan pencemaran lingkungan.

### *Konflik Komunal*

Indonesia dengan kondisi yang sangat heterogen dalam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memiliki potensi terjadinya konflik bernuansa SARA atau yang disebut konflik komunal. Konflik komunal pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang dapat berdampak pada stabilitas nasional.

Dalam skala tertentu konflik komunal dapat berkembang meluas sehingga mengancam jiwa masyarakat banyak dan menjadi ancaman pertahanan karena membahayakan keselamatan bangsa. Pada gradasi tertentu konflik tersebut bereskalasi secara cepat, selain dapat



membahayakan keselamatan masyarakat banyak, juga mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan sipil.

Konflik komunal pada dasarnya menjadi ranah fungsi pertahanan nirmiliter, namun apabila dibiarkan akan dapat bereskalasi secara cepat sehingga mengancam keselamatan bangsa atau berakibat terganggunya roda pemerintahan atau pelayanan umum. Konflik komunal dapat pula dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi atau memecah belah masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, maka untuk mengatasi konflik komunal, instrumen pertahanan dapat dilibatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Ancaman Nirmiliter**

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berasal dari luar negeri atau dapat pula bersumber dari dalam negeri. Kondisi masyarakat Indonesia yang berada dalam kategori miskin, berpendidikan rendah, dan terbelakang dengan jumlah cukup besar membawa dampak terhadap keamanan yang cukup besar dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, ancaman nirmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi dan teknologi, serta keselamatan umum.

Ancaman terhadap ideologi negara dapat berasal dari luar dan dapat pula timbul di dalam negeri. Ancaman berdimensi ideologi yang berasal dari luar dapat berbentuk penetrasi nilai-nilai individualisme



dan materialisme yang berusaha mendesak nilai-nilai komunalisme, spiritualisme, dan gotong-royong yang telah berakar di masyarakat. Sejak keruntuhan Uni Soviet, sistem politik internasional sesungguhnya telah mengalami perubahan yang menyebabkan paham komunis semakin tidak populer. Namun, bagi Indonesia yang pernah menjadi basis kekuatan komunis, pengaruh ideologi komunis belum sepenuhnya hilang. Ancaman ideologi komunis masih tetap merupakan bahaya laten yang diperhitungkan.

Ancaman berdimensi ideologi dapat pula berbentuk gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai kelompok pembaharu, namun dengan cara-cara yang tidak konstitusional dan bertentangan dengan hukum. Gerakan anti kemapanan, pembela rakyat miskin, aliran sesat, serta kelompok radikalisme yang main hakim sendiri dan melakukan tindakan anarkis dengan berlindung di balik atribut keagamaan atau golongan politik fundamental merupakan bentuk ancaman ideologi yang timbul di dalam negeri. Ancaman berbasis ideologi yang timbul dari dalam negeri dapat pula berasal dari kelompok metamorfosis sisa-sisa kelompok radikal di masa lalu atau sisa-sisa G-30-S/PKI yang telah melebur ke dalam elemen masyarakat.

Golongan ancaman nirmiliter yang berimplikasi mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI adalah ancaman yang berdimensi politik, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara melalui tekanan politik, atau dapat pula dilakukan oleh aktor yang bukan negara dengan menggunakan isu-isu global sebagai kendaraan untuk menyerang atau menekan Indonesia. Politik merupakan instrumen utama yang menggerakkan perang, yakni perang merupakan



kelanjutan dari politik dengan cara lain. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara secara total. Pelaksanaan penegakan HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel selalu menjadi komoditas politik bagi masyarakat internasional untuk mengintervensi suatu negara dan hal ini dirasakan pula oleh Indonesia.

Pada tataran internal, kondisi politik yang sehat dapat mendorong terbangunnya stabilitas nasional. Iklim politik yang berkembang secara sehat menggambarkan suksesnya proses demokrasi. Bagi Indonesia, faktor politik menjadi penentu kelanjutan sistem pemerintahan. Sebaliknya, kondisi politik yang fluktuatif dapat mengganggu stabilitas nasional, dan pada spektrum tertentu dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau dapat bentuk menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.

Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik (tanpa senjata), dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional dan karena itu sulit dihadapi dengan menggunakan instrumen militer. Sementara ancaman separatisme dengan bersenjata tidak jarang mengalami kesulitan untuk dihadapi sebagai akibat dari politisasi penanganan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan pendekatan operasi militer. Hal ini membuktikan



bahwa ancaman berdimensi politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan.

Ekonomi tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri tetapi juga merupakan salah satu alat penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antarnegara atau pergaulan internasional. Negara-negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sering menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi ekonominya lebih kuat. Ekonomi yang kuat biasanya diikuti pula dengan politik dan militer yang kuat.

Ancaman berdimensi ekonomi berpotensi menghancurkan pertahanan sebuah negara. Pada dasarnya, ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan per kapita masyarakat yang sangat rendah merupakan bentuk ancaman berdimensi ekonomi yang berakibat terhadap kemiskinan yang berpengaruh langsung terhadap pendidikan dan kesehatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata telah mengakibatkan ketimpangan yang besar, yakni kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin menjadi semakin lebar. Kondisi ini berpotensi terhadap ketidakstabilan keamanan nasional.

Sarana dan prasarana transportasi yang buruk juga menyebabkan distribusi ekonomi belum menyentuh daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar. Di samping itu, kesenjangan ekonomi yang makin tinggi yang menimpa penduduk di daerah-daerah perbatasan serta ketimpangan dalam distribusi kepemilikan kekayaan sumber daya alam antardaerah,



berpotensi terjadinya konflik antar daerah yang mengganggu kohesi nasional. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Indonesia dan merupakan bentuk ancaman berdimensi ekonomi yang mengakibatkan pemborosan keuangan yang sangat tinggi dan berakibat terhadap kelesuan pembangunan dalam jangka panjang. Demikian pula, inflasi dan pengangguran merupakan persoalan yang saling mempengaruhi, yang menyulitkan untuk melakukan pemilihan prioritas, antara menurunkan inflasi dan risiko meningkatnya angka pengangguran atau menurunkan pengangguran dengan risiko inflasi naik.

Ancaman yang berdimensi ekonomi yang bersumber dari dalam dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap pihak asing. Implikasi dari pinjaman luar negeri berakibat terhadap ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain serta utang negara terus membesar. Di samping itu, daya saing Indonesia yang rendah berdampak terhadap posisi tawar Indonesia di forum internasional menjadi rendah pula. Ancaman yang berdimensi ekonomi yang berasal dari luar, antara lain terjadi dari implikasi globalisasi dalam berbagai bidang termasuk pasar bebas semakin dekat pelaksanaannya, sementara kesiapan Indonesia masih tertinggal. Indikator kinerja ekonomi Indonesia pada tingkat dunia berada pada tingkat yang rendah yang berdampak terhadap besarnya potensi krisis ekonomi di waktu-waktu yang akan datang; dan yang sering digunakan pihak luar untuk menekan Indonesia di antaranya pembatasan kuota, pembatasan atau restriksi, embargo sebagian atau seluruhnya hingga blokade ekonomi.

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong



oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu tersebut lama-kelamaan menjadi "kuman penyakit" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antarmasyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan yang sudah melekat. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan termasuk merusak lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino yang dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia.

Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global dengan interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta-merta dan sulit dikontrol. Sebagai akibatnya, terjadi benturan peradaban, sehingga lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Diakui bahwa nilai-nilai luar tidak semuanya negatif, tetapi banyak pula nilai positif yang memberi efek kemajuan untuk diterapkan. Nilai-nilai luar yang positif antara lain kedisiplinan, keuletan bekerja dan belajar, serta pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang produktif



sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera. Nilai-nilai positif tersebut patut diadopsi dan diterapkan dalam membangun masyarakat Indonesia. Dimensi sosial budaya yang menjadi ancaman yang melemahkan bangsa Indonesia di antaranya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang mengancam generasi muda Indonesia. Di samping itu, peredaran media pornografi serta perdagangan wanita, selain mengancam moral juga menjadi media penyebaran virus HIV/AIDS. Penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung sering kali menyebabkan terjadinya benturan peradaban yang mengancam nilai-nilai lokal di Indonesia.

Sisi lain dari kemajuan teknologi dan informasi adalah penyalahgunaannya yang dapat mengancam keselamatan bangsa. Kemajuan iptek pada dasarnya membawa manfaat yang besar bagi umat manusia. Seiring dengan kemajuan iptek tersebut berkembang pula kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek, antara lain *kejahatan siber*, kejahatan perbankan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia sehingga menyebabkan ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Kondisi ketergantungan terhadap negara lain tidak saja berimplikasi Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, tetapi lebih dari itu Indonesia dapat dengan mudah didikte atau dikendalikan oleh negara lain. Kondisi seperti ini menyebabkan nilai tawar Indonesia menjadi rendah, sehingga berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Dari dalam negeri, tantangan yang dihadapi yang dapat berkembang menjadi ancaman yang berdimensi teknologi juga cukup beragam. Pola sikap masyarakat dalam negeri dalam menghargai karya-



karya teknologi sendiri cenderung kurang tampak, bahkan lebih condong menghargai produk luar negeri. Pada dasarnya, Indonesia memiliki SDM yang kualitasnya berdaya saing tinggi jika dibandingkan dengan SDM negara-negara maju. Setiap tahun Indonesia mencetak juara-juara olimpiade sains, yakni di bidang matematika, fisika, kimia dan biologi. Indonesia juga memiliki tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi tinggi, seperti eks PT DI, dan PT LEN. Namun, SDM yang hebat tersebut tidak diberdayakan secara maksimal, sehingga mereka banyak yang lebih memilih bekerja di luar negeri, yang memberikan penghargaan dan penghidupan lebih baik. Kurangnya perhatian serta terbatasnya wadah yang menjamin kegairahan untuk membangun kemampuan bangsa di bidang teknologi berakibat terjadinya gelombang “eksodus” tenaga ahli Indonesia ke luar negeri yang menawarkan kehidupan yang lebih baik.

Ancaman berdimensi teknologi yang tidak kalah serius adalah dampak kemajuan teknologi di bidang informasi yang terlalu berorientasi terhadap bisnis dan mengabaikan aspek moral. Ada kecenderungan program-program tayangan di televisi atau media cetak tidak memiliki pembatasan atau standar sehingga banyak program yang tidak layak ditonton atau dibaca oleh anak-anak atau kelompok umur tertentu. Kondisi tersebut berdampak terhadap perilaku anak-anak dan masyarakat yang tidak pantas atau bertentangan dengan norma agama, sosial budaya, dan hukum, bahkan memberikan kontribusi terhadap maraknya praktik pornografi, kekerasan, atau tindakan kriminal di kalangan masyarakat.

Salah satu bentuk ancaman nirmiliter adalah ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Secara geografis, NKRI berada di kawasan rawan bencana, baik bencana alam, keselamatan transportasi, maupun bencana kelaparan. Bencana yang dapat terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi murni



bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun akumulatif, misalnya pembuangan limbah industri maupun limbah pertambangan lainnya. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana kebakaran hutan.

Sebagai akibat dari bencana tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan timbul ancaman terhadap keselamatan umum, khususnya masyarakat di sekitarnya. Keamanan transportasi merupakan salah satu dimensi keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin tinggi sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, antara lain penurunan tarif penumpang yang berdampak terhadap dampak keselamatan. Keselamatan transportasi juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih lemahnya kepatuhan aparat dalam penegakan hukum dan aturan.

Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan juga merupakan bentuk gangguan keselamatan umum. Menguatnya isu-isu agama dan etnis, termasuk sejumlah konflik yang didasari oleh adanya kesenjangan sosial-ekonomi, merupakan fenomena konflik yang lazim terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Mobilisasi penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, seperti urbanisasi atau migrasi, sering menimbulkan potensi gangguan terhadap keselamatan umum.



## SASARAN STRATEGIS

Pertahanan negara Indonesia bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam mencapai tujuan tersebut pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang semesta dan mandiri.

Dalam strategi pertahanan Negara, tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis, yang terdiri atas lima sasaran strategis yang satu dengan yang lain saling terkait. Substansi sasaran strategis mencakup sasaran di bidang penangkalan, sasaran dalam menghadapi ancaman agresi militer, sasaran dalam mengatasi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, sasaran untuk mengatasi ancaman nirmiliter, serta sasaran dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

**Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Menangkal segala Bentuk Ancaman dan Gangguan yang Membahayakan Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan seluruh Bangsa Indonesia.**

Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala



bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang antipenjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal.

Kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut bangsa Indonesia untuk mengutamakan penangkalan. Konsepsi penangkalan Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan sistem pertahanan semesta yang memadukan pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Kekuatan penangkalan Indonesia diwujudkan dalam pembangunan pertahanan serta kesiapan sumber daya nasional untuk didayagunakan sebagai kekuatan pertahanan negara yang disegani baik oleh kawan maupun lawan.

### **Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Menghadapi Perang dari Agresi militer oleh Negara Asing**

Bagi bangsa Indonesia, ancaman pertahanan negara yang terbesar adalah agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tidak akan membiarkan dirinya diancam, diintimidasi, atau diserang oleh bangsa lain.

Dalam kondisi Indonesia menghadapi tindakan agresi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap Indonesia, kekuatan pertahanan negara akan dikerahkan untuk menyelenggarakan peperangan yang pelaksanaannya dengan operasi militer perang (OMP). OMP merupakan pilihan terakhir bagi Indonesia serta diselenggarakan untuk membela



kepentingan nasional dan menjaga serta melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.

### **Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Menanggulangi Ancaman Militer yang Mengganggu Eksistensi dan Kepentingan NKRI**



Ancaman pertahanan negara selain yang berbentuk agresi juga terdapat ancaman militer yang berskala terbatas sehingga penanganannya dengan pendekatan tertentu yang berbeda dengan pendekatan untuk melawan agresi

militer suatu negara. Bentuk ancaman militer dengan skala terbatas merupakan ancaman yang penanganannya dengan pendekatan operasi militer selain perang (OMSP). Penyelenggaraan pertahanan negara dengan pendekatan OMSP diarahkan untuk menanggulangi bentuk ancaman, seperti pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, separatisme, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Pendekatan penanganan dengan OMSP diselenggarakan melalui pengerahan dan penggunaan kekuatan serta sumber daya nasional yang tertentu, yang berbeda dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam konteks OMP.

### **Terselenggaranya Pertahanan Negara dalam Menangani Ancaman Nirmiliter yang Berimplikasi terhadap Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan Bangsa Indonesia**



Ancaman pertahanan negara yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara dapat berbentuk ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat ditangani secara langsung dengan menggunakan pendekatan kekuatan pertahanan yang bersifat *hard-power*. Ancaman nirmiliter tersebut pada dimensi tertentu dapat berakumulasi dan mengancam kepentingan nasional, bahkan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Kepentingan nasional dan eksistensi bangsa dan negara harus terlindungi dari ancaman nirmiliter yang berdimensi ideologi, politik dan ekonomi, sosial budaya, Kamtibmas, keselamatan umum, dan hukum. Ancaman nirmiliter tidak dapat dihadapi dengan penggunaan kekuatan pertahanan yang bersifat fisik sehingga apabila tidak ditangani, akan timbul risiko besar yang mengancam eksistensi NKRI. Ancaman nirmiliter terkait dengan stabilitas nasional sehingga sangat mendasar untuk ditempatkan sebagai salah satu sasaran pertahanan negara.

### **Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional**

Dunia yang aman dan damai serta lingkungan regional yang stabil merupakan kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan sepanjang waktu. Indonesia tidak dapat hidup dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai oleh konflik yang berkecamuk. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Sejauh ini perdamaian dunia belum dapat diwujudkan. Di sejumlah kawasan masih terdapat konflik antarnegara dan bentuk-bentuk penindasan yang harus ditangani secara bermartabat. Indonesia akan mengembangkan kerja sama pertahanan negara dengan negara lain sebagai wadah untuk bersama-sama dengan negara lain mempromosikan pandangan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.



## KONSEP UMUM STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

### **Pertahanan Berlapis**

Dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, upaya pertahanan negara diselenggarakan dengan Strategi Pertahanan Berlapis. Strategi Pertahanan Berlapis bertumpu pada upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui keterpaduan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Lapis pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk OMP maupun OMSP.

Lapis pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi



pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi.

Strategi Pertahanan Berlapis dikembangkan untuk tujuan penangkalan, mengatasi, dan menanggulangi ancaman militer atau ancaman nirmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut.

## Penangkalan

Pada masa damai, pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara. Strategi Pertahanan Berlapis dalam kerangka penangkalan diwujudkan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan segenap sumber daya nasional secara maksimal, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan penangkalan.

Lapis pertahanan militer sebagai kekuatan bersenjata ditampilkan melalui SDM dan Alutsista, dibangun, dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan sampai pada standar penangkalan. Ukuran standar penangkalan dimaksud adalah standar kekuatan yang disegani minimal pada lingkup regional. Lapis pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan





yang dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi.

Pemberdayaan dan pendayagunaan Lapis Pertahanan Militer dan Lapis Pertahanan Nirmiliter pada masa damai, selain untuk tujuan penangkalan, juga diarahkan untuk memberikan efek stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional dapat terselenggara untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi.

## **Menghadapi Ancaman Militer**

Kekuatan pertahanan negara pada dasarnya dibangun untuk menghasilkan kemampuan penangkalan yang mampu mengamankan dan mengawal NKRI dari setiap ancaman. Namun, pembangunan kekuatan pertahanan negara harus dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman militer yang sewaktu-waktu dapat timbul.

Upaya penangkalan tidak bersifat pasif, tetapi dikembangkan dalam suatu strategi penangkalan yang memiliki sifat dinamis, melalui kesiapsiagaan kekuatan pertahanan untuk menghadapi kondisi terburuk,



yakni menghadapi ancaman aktual dalam bentuk perang atau bentuk ancaman militer lainnya yang bersifat aktual. Dalam konteks “menghadapi ancaman militer”, kekuatan



pertahanan yang dimiliki didayagunakan untuk mengatasi situasi negara yang terancam oleh suatu serangan militer dari negara lain, atau sedang diperhadapkan dengan adanya jenis ancaman aktual yang akan mengganggu kepentingan nasional. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan jenis ancaman dan besarnya risiko yang dihadapi.

Dengan berdasarkan jenis ancaman dan besarnya risiko yang dihadapi, pemilihan strategi pertahanan disusun dalam strategi pertahanan untuk menghadapi ancaman militer berupa agresi militer dari negara lain serta strategi pertahanan untuk menghadapi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer. Strategi pertahanan menghadapi ancaman agresi militer berbeda dengan strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman yang jenisnya bukan agresi militer. Agresi militer mengancam totalitas eksistensi bangsa dan negara sehingga harus dihadapi dengan strategi pertahanan dalam kerangka operasi militer perang dengan pengerahan segenap kekuatan nasional. Sebaliknya, ancaman militer yang lain tidak selalu harus dihadapi dengan OMP. Ancaman militer yang jenisnya bukan agresi militer dihadapi dengan kekuatan pertahanan yang besarnya terbatas dan proporsional dengan besarnya ancaman yang dihadapi serta dengan pola OMSP. Penerapan strategi pertahanan berlapis berlaku untuk konteks menghadapi jenis ancaman militer agresi militer dan ancaman militer yang bukan agresi.

Apabila ancaman aktual berupa ancaman militer yang karakteristiknya memerlukan penanganan melalui OMP, lapis pertahanan militer didayagunakan sebagai inti kekuatan. Dalam hal ini lapis pertahanan militer yang berintikan komponen utama, yakni TNI, dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, di samping disokong oleh lapis pertahanan nirmiliter yang melaksanakan



fungsi-fungsi diplomasi serta upaya-upaya lain dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata.

Apabila ancaman aktual berupa ancaman militer yang karakteristiknya tidak memerlukan penanganan melalui OMP, lapis pertahanan militer didayagunakan sebagai inti kekuatan pertahanan untuk melaksanakan OMSP. Lapis pertahanan nirmiliter sesuai dengan fungsinya yang terkait dengan isu atau ancaman militer yang dihadapi menyokong lapis pertahanan militer guna mencapai hasil yang maksimal.

### **Menghadapi Ancaman Nirmiliter**

Ancaman terhadap bangsa dan negara tidak selalu berbentuk ancaman militer, tetapi juga terdapat bentuk-bentuk ancaman nirmiliter yang mengganggu eksistensi dan kepentingan nasional. Ancaman nirmiliter memiliki dimensi penanganan yang berbeda dengan pendekatan penanganan ancaman militer.

Dalam menghadapi kondisi negara menghadapi ancaman aktual berupa ancaman nirmiliter, sistem pertahanan negara disusun dalam lapis pertahanan nirmiliter sebagai unsur utama untuk mengambil langkah-langkah penanganan dengan pendekatan nirmiliter dengan memberdayakan instrumen ideologi, politik, ekonomi, informasi, psikologi, sosial budaya, teknologi, hukum dan HAM. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.



Pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam peran dan lingkup fungsi departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) di luar bidang pertahanan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kerangka pertahanan berlapis, lapis pertahanan militer menyokong lapis pertahanan nirmiliter, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman militer guna mencapai hasil yang maksimal.



## PENANGKALAN

Strategi pertahanan negara yang paling fundamental adalah penangkalan. Penangkalan yang andal mencegah terjadinya perang. Perang pada dasarnya terjadi sebagai akibat kegagalan usaha pertahanan negara dan kegagalan diplomasi untuk mencegahnya. Konsep penangkalan yang dikembangkan dalam strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya perang adalah strategi penangkalan dengan cara penolakan dan penangkalan dengan cara pembalasan.

### Prinsip Dasar Penangkalan

Penangkalan ditujukan untuk mencegah terjadinya perang. Tidak ada negara yang menghendaki terjadinya perang. Perang selalu mendatangkan malapetaka bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya perang.

Kemampuan suatu negara untuk mengembangkan penangkalannya akan mencegah negara tersebut dari malapetaka, penderitaan, dan kehancuran yang dahsyat. Tidak dapat disangkal bahwa membangun daya tangkal memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, harga yang harus dibayar akibat perang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga dalam membangun daya tangkal.

Oleh karena itu, penangkalan merupakan pilihan dalam upaya pertahanan, sehingga daya tangkal harus dibangun dan dikembangkan sejak dini dan berkesinambungan.



### **Instrumen Penangkalan**

Penangkalan merupakan integrasi usaha pertahanan, yang di dalamnya berisi seluruh instrumen negara untuk saling mendukung dan saling memperkuat. Dari seluruh instrumen tersebut, yang paling dominan meliputi instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer.

#### *Instrumen Politik*

Instrumen politik merupakan salah satu pilar utama penopang negara di samping instrumen lainnya seperti ekonomi, psikologis, teknologi, dan militer. Dalam upaya pertahanan negara, instrumen politik merupakan bagian penting dari kekuatan pertahanan nirmiliter, yakni kekuatan nasional yang tidak bersenjata. Upaya politik sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik antarnegara. Instrumen politik menghasilkan kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara.

Kekuatan politik sebagai faktor penangkalan merupakan refleksi dari sistem pemerintahan demokratis, kuat, bersih, dan berwibawa. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pertahanan dan keamanan yang kuat mampu membangun stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pada tataran internasional, penangkalan dari dimensi politik ditentukan oleh efektivitas diplomasi. Kekuatan diplomasi ditentukan oleh beberapa faktor. *Pertama*, pemerintahan sipil yang sah, bersih, dan berwibawa, yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif, demokratis, dan bertanggung jawab, serta reputasi dan kredibilitasnya



diakui masyarakat internasional. *Kedua*, sistem pembangunan nasional berkembang secara dinamis dengan hasil-hasil pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Ketiga*, stabilitas nasional makin kokoh di segala bidang karena ditopang oleh kinerja penegakan hukum yang terus meningkat. *Keempat*, pertahanan negara kuat dan disegani, baik di kawasan regional maupun internasional. *Kelima*, para pelaku fungsi diplomasi kredibel dan memiliki reputasi internasional.

Sistem politik harus mampu membangun kepercayaan internasional terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam mengelola pembangunan nasional dan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan stabilitas keamanan regional dan perdamaian dunia. Dalam upaya pertahanan negara, diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara merupakan modalitas yang dikembangkan secara efektif yang pelaksanaannya harus pula ditopang oleh pertahanan militer yang kuat dan aktif. Untuk itu, unsur-unsur pertahanan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara harus dikembangkan sampai pada tingkat penangkalan yang disegani lawan. Kondisi tersebut ditentukan oleh tingkat kemampuan prajurit yang didukung oleh alat utama sistem senjata (Alutsista) yang andal serta kepemimpinan dan manajemen yang efektif.

### *Instrumen Ekonomi*

Bidang ekonomi merupakan pilar negara dalam memelihara kelangsungan hidup suatu bangsa. Instrumen ekonomi mencakupi sumber daya alam, sumber daya buatan, industri, moneter, fiskal, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memberikan kontribusi penting bagi stabilitas nasional. Ekonomi yang sehat dan stabil



akan memungkinkan pembangunan pertahanan berjalan baik.

Strategi membangun ekonomi sebagai salah satu faktor penangkal adalah membangun sektor ekonomi yang sehat sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain dibangun secara mutualistik, dengan memanfaatkan setinggi-tingginya sektor-sektor ekonomi yang memiliki posisi tawar tinggi.

Sumber daya alam yang menjadi andalan dan menjadi kebutuhan negara-negara industri, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk mempertinggi posisi tawar Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral maupun dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks globalisasi dengan ekonomi dan perdagangan menjadi faktor utama, Indonesia perlu menempatkan diri sebagai pemain yang ikut mempengaruhi dan memberikan arah terhadap globalisasi dan tidak sekadar menjadi pasar atas produk negara-negara lain.

Dalam bidang pertahanan, bidang ekonomi merupakan faktor vital dalam pembangunan pertahanan. Dari aspek ekonomi, Indonesia pada dasarnya memiliki posisi tawar yang cukup tinggi melalui sejumlah sumber daya alam yang bernilai strategis, yang menjadi kebutuhan negara-negara industri maju. Faktor sumber daya alam dapat digunakan dalam mengembangkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Indonesia harus dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi negara lain. Dalam kondisi terkena restriksi, embargo, atau sanksi ekonomi dalam skala besar yang berupa blokade ekonomi, Indonesia harus dapat mengatasinya dengan kemampuan ekonomi sendiri. Oleh karena itu, aspek ekonomi harus dibangun pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindarkan negara dari risiko ekonomi yang berimplikasi pada pertahanan. Dalam pola defensif aktif, ekonomi harus menjadi instrumen



untuk menekan negara lain yang mengancam Indonesia.

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bangsa dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan merasa tercukupi kebutuhannya sehingga akan memiliki kebanggaan untuk menjadi bangsa Indonesia.

Tumbuhnya nasionalisme yang membuat warga negara rela berkorban bagi bangsa dan negara bermula dari kebanggaan menjadi bangsa Indonesia, dan itu terjadi apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam pola pertahanan defensif aktif, sektor ekonomi harus mengambil peran yang konkret.

### *Instrumen Psikologis*

Aspek psikologis merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan dalam menyusun strategi pertahanan. Dalam kerangka penangkalan, instrumen psikologis dibangun dalam wujud persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan nasionalisme, patriotisme, serta militansi bangsa Indonesia untuk mencintai dan membela NKRI. Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan percaya diri bangsa sebagai faktor psikologi yang berdimensi penangkalan, perlu menghidupkan kembali upaya untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dengan menggunakan media massa dan alat komunikasi massa, seperti film, tayangan televisi, surat kabar, dan buku pelajaran. Film perjuangan perlu dapat menjadi media untuk mengomunikasikan kepada generasi muda tentang pahit-getirnya usaha untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dapat memfasilitasi pembuatan film dokumenter dan mengikutsertakan para pengusaha



dalam negeri untuk berperan serta dalam pembuatannya dan mempromosikannya kepada masyarakat.

### *Instrumen Teknologi*

Secara global, revolusi di bidang militer yang paling menonjol adalah di bidang teknologi. Revolusi di bidang militer berkembang sangat pesat dan berpengaruh terhadap konsepsi pertahanan di bidang doktrin, strategi pertahanan, postur, dan kebijakan pertahanan setiap negara. Dalam strategi penangkalan, teknologi memegang peranan penting. Ketergantungan pada negara lain di bidang teknologi akan berdampak terhadap daya tangkal bangsa. Sebaliknya, kemandirian dalam bidang teknologi, terutama teknologi militer, berefek terhadap peningkatan daya tangkal bangsa.

Dalam membangun daya tangkal pertahanan yang disegani, instrumen teknologi memiliki peran yang sangat vital, yakni melalui rekayasa Alutsista untuk dikembangkan menjadi produk dalam negeri. Selama ini ketergantungan Indonesia terhadap Alutsista produksi luar negeri masih sangat tinggi yang akibatnya tingkat penangkalan Indonesia menjadi rendah. Dengan memproduksi sendiri Alutsista dan kebutuhan pertahanan, akan terjamin ketersediaan pasokan dalam jangka panjang serta menimbulkan efek penangkalan yang cukup tinggi.

### *Instrumen Militer*

TNI merupakan instrumen utama kekuatan nasional dalam rangka mendukung kepentingan nasional bersama-sama dengan instrumen lainnya. Apabila cara-cara nirmiliter gagal melindungi



kepentingan nasional, sebagai langkah terakhir digunakan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer sebagai jalan terakhir merupakan filosofi bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Pelaksanaan diplomasi akan efektif bila didukung oleh kekuatan militer yang kuat.

Dalam pola defensif aktif, kekuatan militer harus dibangun untuk mempunyai kemampuan yang berdaya tangkal memadai sehingga disegani oleh negara lain. Pembangunan kemampuan militer tersebut dilakukan, selain atas dasar pertimbangan kemampuan ekonomi negara, juga atas analisis risiko kemungkinan ancaman terhadap NKRI.

### **Pendekatan Strategi Penangkalan**

Keberhasilan penangkalan dapat ditunjukkan apabila pihak yang mempunyai niat menyerang Indonesia mengurungkan niatnya. Strategi penangkalan yang dikembangkan dapat dilaksanakan melalui strategi penangkalan dengan cara penolakan atau penangkalan dengan cara pembalasan.

#### *Penangkalan dengan Cara Penolakan*

Penangkalan dengan cara penolakan pada dasarnya merupakan daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah tangkal sehingga pihak lawan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia. Kekuatan pertahanan dengan kemampuan penangkalan dengan cara penolakan adalah tingkat kemampuan yang mampu meyakinkan pihak lawan atau calon lawan bahwa apabila melancarkan agresi atau menyerang Indonesia, akan dialami



kegagalan sebelum masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga dengan pertimbangan itu, calon lawan akan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia.

Sesungguhnya, penangkalan dengan cara penolakan adalah konsep pertahanan yang ideal karena pihak lawan akan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia dengan kekuatan militernya. Penerapan konsep ini mencegah risiko perang. Namun, hal itu membawa konsekuensi pembangunan sistem pertahanan yang modern berbasis Alutsista yang canggih dan andal.

Dalam kondisi adanya tantangan pembangunan nasional digalakkan di sejumlah sektor, terutama sektor ekonomi dan pendidikan nasional, membangun sistem pertahanan negara berbasis Alutsista yang kuat untuk penangkalan dengan cara penolakan, bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak boleh dikesampingkan. Dalam lingkup regional, pembangunan pertahanan negara pada tingkat kemampuan penangkalan dengan cara penolakan harus dapat diwujudkan meskipun harus dilakukan secara bertahap. Kemampuan penangkalan dengan cara penolakan sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam mengawal kedaulatan NKRI serta mengamankan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional atau paling tidak di tingkat regional.

Salah satu pola pendekatan yang dikembangkan adalah pengembangan kemampuan pertahanan yang integratif melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut harus dapat dikembangkan melalui pemberdayaan pertahanan nirmiliter secara integratif dengan pertahanan militer dalam membangun daya tangkal yang sesungguhnya.



### *Penangkalan dengan Cara Pembalasan*

Penangkalan dengan cara pembalasan pada dasarnya adalah daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah-tangkal atas niat pihak lawan yang ingin menyerang Indonesia karena kemampuan balas Indonesia yang hebat. Sekalipun pihak lawan merasa yakin bisa menyerang, kemampuan balas Indonesia yang hebat mengakibatkan pihak lawan semakin menyadari bahwa jika menduduki Indonesia pada akhirnya akan menderita kerugian yang besar.

Penangkalan dengan cara pembalasan merupakan konsep pertahanan yang paling cocok bagi negara-negara berkembang yang mempunyai kendala dalam membangun pertahanan militer berbasis Alutsista secara ideal. Ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang ideal memungkinkan pihak lawan menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Demi mempertahankan eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negara, cara yang akan dilaksanakan adalah pertempuran berlarut. Konsekuensi ini tidak dapat dihindari demi tegaknya NKRI sehingga penangkalan dengan cara pembalasan menjadi pilihan strategis pertahanan Indonesia.

Dalam analisis ancaman, suatu negara yang memiliki niat merancang serangan terhadap negara lain, selain karena alasan politik yang memaksa penggunaan kekuatan militer, juga didasarkan pada beberapa faktor utama untuk menyelenggarakan peperangan. Faktor tersebut di antaranya keunggulan kekuatan militer yang dimilikinya melebihi kekuatan militer dari negara yang hendak diserang, kemampuan ekonomi dan keuangan untuk biaya perang yang sangat mahal, serta dukungan sumber daya nasional untuk menjaga kesinambungan peperangan dalam jangka panjang. Negara yang tergabung dalam



suatu pakta pertahanan atau aliansi biasanya akan saling membantu ketika salah satu dari anggotanya menghadapi ancaman.

Adanya pakta-pakta pertahanan yang eksis saat ini merupakan realitas adanya kekuatan kolektif yang memiliki kemampuan untuk menyerang suatu negara, termasuk Indonesia, terlebih lagi dengan perkembangan konsep pertahanan di Abad XXI yang beberapa negara menerapkan strategi serangan *preemptive* yang ditujukan untuk menyerang sarang-sarang terorisme; terdapat potensi bahwa Indonesia di masa datang dapat menghadapi serangan kekuatan militer dari negara lain. Dalam menghadapi kemungkinan terburuk, yakni serangan dari negara lain, konsep penangkalan dengan cara pembalasan sangat beralasan untuk dikembangkan Indonesia.

Kemampuan pembalasan Indonesia yang paling utama adalah kemampuan melaksanakan perang berlarut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, melalui satuan-satuan gerilya yang sangat mobil dan militan. Upaya untuk mewujudkan kemampuan gerilya sebagai inti penangkalan Indonesia dengan cara pembalasan Indonesia dilaksanakan sejak dini dan diintegrasikan dengan pembangunan sistem pertahanan semesta, baik secara militer maupun nirmiliter.

### **Pilihan Strategis**

Strategi penangkalan dengan cara penolakan dan dengan cara pembalasan, keduanya, memiliki kelebihan dan kelemahan. Strategi penangkalan dengan pola penolakan menuntut kekuatan militer yang superior dan modern. Membangun kekuatan militer yang superior dalam sistem senjata tidak saja membutuhkan anggaran pertahanan



yang sangat besar, yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah, tetapi juga akan berbenturan dengan politik internasional.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk mengatasi kedua faktor di atas, pilihan strategi pertahanan Indonesia ke depan adalah membangun kemampuan dengan cara pembalasan yang tinggi dengan mengembangkan pola penolakan secara bertahap untuk memperkuat kemampuan pembalasan unsur-unsur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Dari pertimbangan tersebut, strategi penangkalan Indonesia merupakan gabungan dari penangkalan dengan cara penolakan dan dengan cara pembalasan berupa pertahanan melingkar multilapis dengan pusat kekuatan dukungan rakyat atas peran TNI sebagai kekuatan utama. Kekuatan tersebut merupakan totalitas pertahanan terpadu yang diperankan oleh lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter untuk menghadapi setiap bentuk ancaman. Pada tingkat nasional kekuatan itu berupa jaringan terpadu ketahanan nasional yang dikembangkan sampai pada tingkat provinsi dan daerah didasari dengan memantapkan jati diri bangsa dan semangat bela negara serta didukung kemandirian industri pertahanan untuk mendukung operasi TNI. Di tingkat regional berupa kerja sama antarnegara melalui wadah Association of South East Asia Nation (ASEAN) dengan menggunakan tiga Pilar ASEAN, yakni masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat budaya ASEAN, dan masyarakat keamanan ASEAN.



## Formulasi Strategi Penangkalan

### *Pertahanan Militer*

Pertahanan militer dalam mewujudkan kemampuan penangkalan dikembangkan dalam formulasi sebagai berikut.

*Pertama*, pertahanan Indonesia membangun konsep pertahanan berlapis yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer dilaksanakan secara Tri-Matra Terpadu dengan pusat kekuatan berupa dukungan rakyat atas peran TNI sebagai satu kesatuan dan totalitas pertahanan Indonesia.



*Kedua*, pertahanan Indonesia yang dikembangkan dalam pola pertahanan berlapis yang mengedepankan kemampuan penangkalan dengan menggabungkan penangkalan dengan cara penolakan dan penangkalan dengan cara pembalasan, terdiri atas kekuatan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam susunan komponen cadangan dan komponen pendukung. Kemampuan penangkalan dengan cara penolakan tercermin dalam semangat pantang menyerah untuk melaksanakan suatu perang total demi mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kemampuan penangkalan dengan cara penolakan juga diwujudkan dalam menyusun kemampuan perlawanan berlarut



sebagai kelanjutan perang total yang dipersiapkan di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah, melawan, menguras, dan menghancurkan kekuatan militer musuh yang mengancam, menyerang, menduduki, atau menguasai wilayah Indonesia.

*Ketiga*, pertahanan berlapis yang dilaksanakan dengan perlawanan berlarut, selain untuk tujuan penangkalan dengan cara penolakan, juga untuk tujuan strategi penangkalan dengan cara pembalasan. Implementasi penangkalan dengan cara pembalasan melalui kemampuan perang gerilya yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi ketika upaya pertahanan konvensional tidak efektif, yang dimiliki oleh unsur-unsur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dengan basis-basis perlawanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

*Keempat*, dalam rangka penangkalan dengan cara penolakan, kemampuan khusus perseorangan untuk melakukan pertempuran, didukung oleh penguasaan wilayah dan penguasaan medan, dikembangkan dalam pola pembinaan yang berkesinambungan. Dalam rangka itu, kekuatan khusus TNI meliputi Pasukan Khusus TNI AD, Pasukan Katak dan Pengintai Amphibi TNI AL, dan kemampuan Pasukan Khas TNI AU yang dibangun dan dikembangkan secara khusus, yang pada waktunya menjadi inti perjuangan dalam perang berlarut serta untuk menambah daya tangkal pertahanan Indonesia. Kemampuan khusus yang dikembangkan mencakupi kemampuan





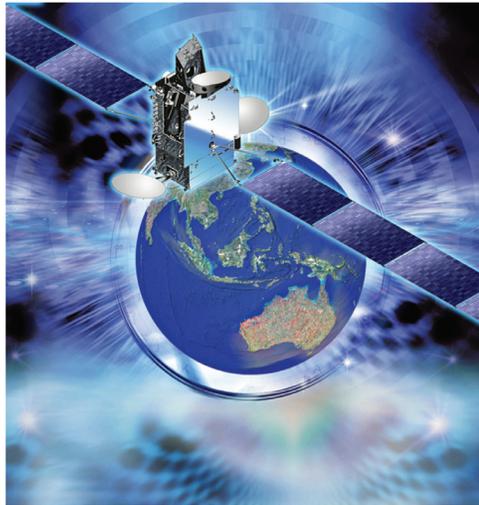
intelijen dan kemampuan tempur prajurit secara perseorangan dan kesatuan, khususnya kemampuan manusia dan intelijen teknologi dikembangkan sedini mungkin supaya mempunyai kemampuan yang andal. Demikian pula, kemampuan tempur prajurit TNI dikembangkan dengan membangun semangat pantang menyerah di kalangan prajurit pada ketiga matra untuk menghadapi perang berlarut.

### *Pertahanan Nirmiliter*

Formulasi pertahanan nirmiliter dalam mewujudkan kemampuan penangkalan dikembangkan melalui.

*Pertama*, pertahanan nirmiliter membangun sistem politik yang sehat dan berdaya saing yang mendorong percepatan pembangunan nasional serta menghasilkan kualitas politik yang mampu berkiprah di forum internasional. Pada lingkup dalam negeri, sistem politik dikembangkan dalam kerangka negara demokrasi yang memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan mewujudkan iklim yang sehat dan dinamis serta mencegah setiap potensi konflik. Pada lingkup internasional, sistem politik membangun kemampuan diplomasi yang efektif serta tampil sebagai lini pertahanan terdepan yang diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

*Kedua*, Mengembangkan dan mendayagunakan sektor-sektor perekonomian yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi di forum internasional. Dalam mendukung kepentingan pertahanan jangka panjang, kemampuan ekonomi dibangun untuk mampu bertahan dalam menghadapi resesi dunia yang paling berat, serta dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan penerapan tekanan ekonomi oleh negara lain.



*Ketiga*, dari aspek psikologi dan sosial, dikembangkan melalui pembangunan moral, semangat persatuan, dan kesatuan bangsa, serta ketahanan budaya ditumbuhkembangkan dan direvitalisasi. Dalam kerangka menghadapi tantangan global serta dinamika pembangunan nasional dilaksanakan pemupukan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dalam format bela negara serta menumbuhkembangkan nilai-nilai patriotik, heroik, dan nasionalisme sejak dini bagi seluruh bangsa Indonesia.

*Keempat*, dari aspek teknologi, dibangun kemampuan industri nasional yang mampu berdaya saing di era globalisasi serta berperan dalam mencukupi kebutuhan pertahanan negara dan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Dalam kerangka penangkalan, pertumbuhan industri nasional mendorong kemandirian industri pertahanan melalui penciptaan alat utama sistem senjata yang bernilai strategis dan berefek daya tangkal.



### MENGHADAPI ANCAMAN MILITER

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapat perhatian utama karena berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya.

Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber dan bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Dalam menghadapi ancaman agresi, yakni invasi suatu negara terhadap Indonesia, strategi yang digunakan adalah pertahanan yang mendayagunakan segenap kekuatan pertahanan secara total karena yang dipertaruhkan adalah hidup-matinya NKRI. Sebaliknya, dalam menghadapi ancaman militer dengan jenis bukan invasi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan skala ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkannya.

#### **Menghadapi Agresi Militer**

Ancaman militer yang menjadi fokus utama pengerahan kekuatan pertahanan secara total adalah dalam menghadapi bentuk agresi militer atau aksi serangan *preemptive*. Agresi militer atau aksi serangan *preemptive* tersebut adalah ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Upaya pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain dilaksanakan dengan



mengerahkan seluruh kekuatan nasional baik militer maupun nirmiliter. Pelaksanaannya dilakukan dengan strategi pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam melalui pendayagunaan lapis pertahanan nirmiliter dan lapis pertahanan militer secara terintegrasi dan saling memperkuat.

Wujud pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam dimulai dari upaya pencegahan berupa pengerahan pertahanan nirmiliter melalui diplomasi dan perlawanan tanpa senjata serta diikuti pertahanan militer apabila upaya pertahanan nirmiliter tidak lagi efektif.

### *Lapis Diplomasi*

Indonesia bukan negara agresor. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara. Untuk mengatasi setiap perselisihan atau konflik dengan negara lain, Indonesia akan selalu mengedepankan usaha-usaha diplomatik.

Komitmen bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa adalah tidak akan membiarkan negara lain menyerang setiap jengkal tanah dari wilayah Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman militer negara lain, bangsa Indonesia akan mengembangkan strategi pertahanan defensif aktif. Salah satu wujud pertahanan defensif aktif adalah pengedepanan diplomasi sebagai garis terluar pertahanan negara. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik penjinakan, yakni mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Oleh karena itu, dalam sistem pertahanan, diplomasi sebagai lini pertahanan terdepan merupakan modalitas yang dikembangkan secara efektif untuk mencegah suatu negara menyerang Indonesia, baik dalam kerangka serangan *preemptive* maupun untuk tujuan menginvasi Indonesia.



Usaha-usaha diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiapsiagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.

### *Lapis Perlawanan Rakyat secara Spontan*

Selain melalui diplomasi, usaha pertahanan nirmiliter menghadapi serangan militer suatu negara adalah dengan pendekatan perlawanan non-kekerasan yang masih dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas. Perlawanan rakyat tanpa senjata untuk menolak usaha suatu negara yang hendak menyerang Indonesia merupakan salah satu lapisan pertahanan yang masih dapat dikembangkan.



Perlawanan rakyat yang tidak bersenjata untuk menghadapi ancaman militer suatu negara tidak dimaksudkan untuk menjadikan rakyat sipil sebagai "tameng hidup" atau menjadikan seluruh rakyat sebagai kombatan. Akan tetapi, ketika yang terancam adalah kelangsungan hidup bangsa, mati-hidupnya NKRI, seluruh bangsa Indonesia harus memandang serangan militer negara lain sebagai ancaman terhadap



seluruh bangsa Indonesia, tanpa terkecuali.

Wujud perlawanan rakyat tidak bersenjata itu berupa reaksi spontan dan menyeluruh dari bangsa Indonesia untuk menentang dan menolak aksi serangan militer suatu negara. Penentangan dan penolakan setiap bentuk usaha negara lain yang menyerang Indonesia dapat dilakukan melalui aksi turun ke jalan, mendorong aksi solidaritas antarnegara sekawasan atau sesama; anggota organisasi negara-negara Islam.

### *Lapis Pertahanan Militer*

Lapis pertahanan militer adalah perlawanan dengan kekuatan senjata untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Pertahanan militer berintikan TNI sebagai kekuatan utama, yang didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung.

Pengeralahan kekuatan militer dilakukan apabila lapis pertahanan melalui diplomasi dan usaha-usaha nirmiliter lainnya telah mengalami jalan buntu. Tahapannya adalah pengeralahan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam strategi pertahanan berlapis. Upaya pertahanan militer dikembangkan dalam pola OMP, yang disusun dalam strategi pertahanan defensif aktif dan pertahanan berlapis untuk tujuan preventif, preemptive, dan koersif.

*Pertahanan militer untuk tujuan preventif* dilaksanakan secara aktif untuk memperkuat diplomasi dalam membatalkan dan mencegah niat suatu negara melakukan serangan militer terhadap Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tindakan *preventif*, kekuatan militer Indonesia harus mempunyai daya penggentar yang dapat membatalkan niat suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Strategi yang dikembangkan dalam



pola preventif adalah melalui pameran kekuatan, reposisi pasukan dari gelar pembinaan ke gelar operasi, serta menyusun pertahanan secara mendalam.

*Pertahanan militer untuk tujuan preemptive* dilaksanakan guna merebut inisiatif, yaitu mendahului tindakan lawan yang nyata-nyata hendak menyerang Indonesia. Mandala operasi untuk melaksanakan upaya *preemptive* adalah di wilayah negara yang berniat dan telah bersiap-siap menyerang Indonesia atau sejauh mungkin di luar wilayah Indonesia, yakni ketika musuh dalam perjalanan menuju Indonesia. Tindakan militer untuk menghadang serangan atau agresi negara lain dalam rangka preemptive dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan TNI sejauh mungkin sebelum musuh memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.



*Pertahanan militer menghadapi agresi musuh yang telah masuk wilayah Indonesia* dilaksanakan dalam susunan pertahanan mendalam dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk mencegat dan menghancurkan kekuatan militer lawan dari luar batas ZEE hingga ke posisi daratan wilayah Indonesia. Pertahanan militer dengan strategi pertahanan mendalam bersifat Tri-Matra Terpadu, yakni Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara. Keterpaduan Tri-Matra tercermin dalam operasi militer secara gabungan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai. Strategi pertahanan yang diberlakukan adalah strategi pertahanan militer yang pelaksanaannya menjadi lingkup kewenangan Panglima TNI dan Panglima



Mandala Perang yang ditunjuk oleh Presiden.

Dalam menghadapi kemungkinan perang berlarut, lapis pertahanan kewilayahan dipersiapkan sejak dini. Susunan lapis pertahanan kewilayahan bersifat gabungan Tri-Matra yang terdiri atas unsur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Lapis pertahanan kewilayahan bertumpu pada kekuatan gabungan dengan inti pertahanan darat yang digelar ke dalam Komando Kewilayahan Darat dan unsur-unsur Kostrad serta Kopassus, yang didukung oleh kekuatan Komando Kewilayahan Laut, Komando Kewilayahan Udara, Armada, dan Komando Operasi Udara.

*Komando Pertahanan Kewilayahan* adalah lapis pertahanan dengan strategi pertahanan mendalam yang dikembangkan agar mampu menyelenggarakan pertahanan dan perlawanan secara mandiri, berlanjut, bahkan bila perlu perlawanan berlarut hingga kekuatan militer lawan dapat dihancurkan dan dilempar ke luar.

### *Lapis Pertahanan untuk Perang Berlarut*

Pertahanan untuk tujuan perang berlarut merupakan lapis terakhir dari sistem pertahanan Indonesia, yang menentukan hidup-matinya bangsa Indonesia. Sebagai lapis terakhir, Strategi Perang Berlarut merupakan bentuk Perang Semesta yang melibatkan seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan tetap tegaknya NKRI.

Strategi Perang Berlarut dilaksanakan manakala perlawanan konvensional yang mengintegrasikan upaya pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter tidak memberikan hasil. Maka, demi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, perang berlarut menjadi pilihan dan diselenggarakan secara total, tanpa mengenal menyerah dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh lawan. Strategi Perang Berlarut menggunakan taktik perang gerilya untuk menguras kemampuan lawan



dan pada saat yang tepat melancarkan serangan balas yang menentukan untuk mengusir lawan keluar dari wilayah NKRI.

Sebagai bagian dari sistem pertahanan Indonesia, lapis pertahanan dengan Strategi Perang Berlarut harus dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Pertahanan sebagai unsur utama bekerja sama dengan TNI dan unsur-unsur pemerintahan lainnya dalam mempersiapkan konsepsi strategi perang ini dan secara bertahap dan berlanjut membangun infrastruktur yang diperlukan.

Dalam menyokong Strategi Perang Berlarut, setiap kompartemen yang sekaligus berfungsi sebagai inti kekuatan mempersiapkan penyelenggaraan perang berlarut, mulai dari unsur ruang, SDM, logistik wilayah, serta aspek strategi berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing.

### **Menghadapi Ancaman Militer Berbentuk Bukan Agresi**

Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia. Bentuk ancaman militer yang dimaksud, antara lain, adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal.

Untuk menghadapi bentuk ancaman militer yang bentuknya bukan agresi, upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengerahkan



kekuatan siap nasional yang besarnya disesuaikan dengan besarnya ancaman, dengan pelaksanaannya berdasarkan keputusan politik atau melalui suatu mekanisme atau prosedur tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Strategi pertahanan menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dihadapi dengan menggunakan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara matra atau secara gabungan dalam susunan Tri-Matra Terpadu. Besarnya kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besaran ancaman yang dihadapi.

Lapis pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman bukan agresi diarahkan untuk penanganan aspek-aspek nirmiliter yang melekat pada ancaman tersebut sehingga dapat memaksimalkan hasil yang dicapai. Pelaksanaannya dilakukan secara fungsional sesuai dengan lingkup kewenangan departemen/LPND.

### *Menangani Pelanggaran Wilayah*

Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menangani aksi pelanggaran wilayah oleh negara lain hal ini merupakan wujud upaya penegakan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dan bangsa Indonesia. Perwujudannya melalui langkah-langkah militer



sesuai dengan kewenangan, dengan mengerahkan kekuatan militer yang disiagakan, yang kekuatannya disesuaikan dengan ruang dan waktu



serta besaran ancaman yang dihadapi. Kekuatan militer yang disiagakan tersebut merupakan kekuatan penangkal untuk mencegah ancaman, dan menangani aksi pelanggaran wilayah yang terjadi sesuai dengan ruang dan waktu kejadian. Dalam melaksanakan penanganan terhadap pelanggaran wilayah, upaya yang dilakukan adalah mengedepankan penanganan dengan pola OMSP, dengan kemampuan maksimal untuk mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi kontak fisik. Tindakan secara terbatas dan terukur diwujudkan dalam bentuk peringatan kepada pelaku serta menggiringnya ke luar wilayah dan sedapat mungkin menghindari kontak fisik. Pengambilan putusan dari OMSP menjadi OMP harus disesuaikan dengan doktrin pertahanan negara yang OMP merupakan jalan terakhir dan berdasarkan prosedur operasi militer yang berlaku untuk penanganan pelanggaran wilayah yang disusun oleh Panglima TNI.

Dalam konteks mencegah penanganan ancaman pelanggaran wilayah, lapis pertahanan nirmiliter mempunyai peran dengan lingkup upaya diplomasi sebagai lini depan pertahanan, yang dikembangkan secara efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar wilayah. Upaya diplomasi juga diselenggarakan untuk mencari solusi secara bermartabat atas tindakan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh unsur militer/nonkomersial suatu negara. Sasaran diplomasi adalah agar pelanggaran wilayah tidak berakibat terhadap memburuknya hubungan kedua negara. Selain diplomasi yang bersifat kondisional, diperlukan upaya pertahanan nirmiliter yang bersifat jangka panjang, yakni melalui pembenahan perangkat hukum yang berkaitan dengan perbatasan antarnegara.



### *Mengatasi Gerakan Separatisme*

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme merupakan urusan dalam negeri Indonesia dan dihadapi dengan cara-cara bangsa Indonesia, dengan memperhatikan norma-norma hukum dan demokrasi. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata didasari oleh putusan politik dan dilindungi oleh undang-undang. Besar kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan tingkat penyebaran ancaman separatisme serta kekuatan gerakan separatisme bersenjata.

Penggunaan kekuatan TNI untuk menumpas gerakan separatisme bersenjata dilaksanakan dengan OMSP dengan mengembangkan strategi yang tepat dan efektif. Dengan berdasarkan putusan politik yang menugasi TNI untuk mengatasi ancaman separatisme bersenjata, Panglima TNI mengembangkan strategi operasi militer sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Operasi militer yang diselenggarakan oleh TNI diperkuat oleh upaya-upaya pertahanan nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsinya masing-masing instansi pemerintah.

Lapis pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman separatisme memiliki peran vital untuk melakukan langkah-langkah nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsi dan kewenangannya. Perkembangan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok separatis terus melakukan proses regenerasi. Kelompok tersebut memanfaatkan momentum demokratisasi untuk melakukan perjuangan dengan pola perjuangan tidak bersenjata serta berusaha mencari perhatian dan dukungan masyarakat internasional.

Pola gerakan dan perkembangan gerakan separatisme tersebut harus diikuti dengan peran lapis pertahanan sipil untuk menyusun strategi pertahanan nirmiliter yang tepat dan efektif. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk memperkuat usaha pemerintah dalam



menyadarkan kelompok separatis semakin diperlukan. Pelibatan lapis pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan sehingga akar masalah separatisme dapat diatasi secara tuntas dan bermartabat. Instansi pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi vokal point dalam mengembangkan strategi pertahanan nirmiliter dalam penanganan separatisme, dengan berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan, termasuk dalam mempelajari akar permasalahan yang menjadi penyebab berkembangnya separatisme serta secara komprehensif mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak dengan didasarkan pada aturan dan kaidah hukum yang berlaku.

### *Mengatasi Pemberontakan Bersenjata*

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman pemberontakan bersenjata diletakkan dalam kerangka penegakan kedaulatan negara yang direpresentasikan oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk mengatasi pemberontakan bersenjata didasarkan pada putusan politik dan dilindungi oleh undang-undang. Besar kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan besar dan kompleksitasnya ancaman yang dihadapi.

Penggunaan kekuatan TNI untuk menumpas pemberontakan bersenjata atau pemberontakan dilaksanakan dengan OMSP dengan mengembangkan strategi yang tepat dan efektif serta memperhatikan kaidah-kaidah demokrasi dan hukum yang berlaku. Dengan berdasarkan putusan politik yang menugasi TNI mengatasi ancaman pemberontakan bersenjata, Panglima TNI mengembangkan strategi operasi militer sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. OMSP yang diselenggarakan



oleh TNI diperkuat oleh upaya-upaya pertahanan nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsinya masing-masing. Lapis pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman pemberontakan bersenjata memiliki peran vital untuk melakukan langkah-langkah nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsi dan kewenangannya.

### *Menangani Sabotase*

Lapis pertahanan militer dalam penanganan ancaman sabotase diarahkan pada tindakan pencegahan dan penanganan untuk mengatasi ancaman sabotase yang diletakkan dalam kerangka keselamatan bangsa. Penanganan ancaman sabotase juga diarahkan untuk melindungi kepentingan pertahanan, antara lain menjamin keamanan personel, Alutsista, pangkalan, dan instalasi pertahanan.

Penanganan terhadap ancaman sabotase dilaksanakan dengan strategi dan pola operasi khusus dalam bentuk OMSP. Kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan tingkatan risiko serta misi yang diemban.

Dalam rangka penanganan terhadap ancaman sabotase, dikembangkan kemampuan unit-unit khusus TNI yang diperlengkapi dengan alat peralatan teknologi untuk mendeteksi dan melumpuhkan usaha sabotase yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan.

Lapis pertahanan nirmiliter dalam mengatasi ancaman sabotase juga memiliki peran vital dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan ancaman sabotase. Unsur pertahanan nirmiliter dalam lingkup fungsi dan kewenangannya berperan dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk waspada dan tanggap terhadap situasi yang berkembang di lingkungannya serta melaporkan secara dini kepada pihak yang berwenang apabila terdapat



indikasi yang mengarah kepada tindakan sabotase.

Dalam konteks itu lapis pertahanan nirmiliter mengembangkan model-model penanganan yang efektif serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat untuk menyerap dan menggunakannya. Model yang dikembangkan, di antaranya, adalah sistem peringatan dini serta sistem keamanan lingkungan di seluruh wilayah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga memiliki daya penggentar yang efektif.

### *Menangani Aksi Spionase*

Aksi spionase merupakan jenis ancaman militer yang ditangani dengan kekuatan dan kemampuan militer. Strategi penanganan aksi spionase dilaksanakan dengan OMSP, yang dilakukan oleh unit khusus serta berada dalam lingkup fungsi intelijen pertahanan yang diperkuat dengan fungsi intelijen TNI atau angkatan. OMSP dalam penanganan aksi spionase dikembangkan dalam operasi khusus untuk membongkar, melumpuhkan, dan membersihkan jaringan spionase.

Lapis pertahanan nirmiliter dalam penanganan aksi spionase memiliki peran penting untuk melakukan langkah-langkah baik secara mandiri dan bersama-sama dengan lapis pertahanan militer. Sebagai langkah pencegahan, unsur pertahanan nirmiliter di lingkungan fungsi masing-masing terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya spionase bagi kepentingan bangsa dan negara. Unsur-unsur tersebut meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh kegiatan spionase.

Dalam lingkup internal di instansi masing-masing, perlu disusun



sistem pertahanan sipil yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi ancaman spionase melalui sistem pengamanan berita atau dokumen dan keamanan pegawai (personel), baik secara fisik dengan menggunakan sarana manusia atau alat teknologi maupun dalam bentuk prosedur tetap yang dilatihkan secara berkala. Peran lapis pertahanan nirmiliter juga diwujudkan dalam membangun efek jera melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindakan atau sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan spionase.

### *Menangani Ancaman Terorisme*

Penanganan terhadap aksi kejahatan terorisme melalui pendekatan pertahanan militer adalah bagian dari fungsi pertahanan negara untuk melindungi keselamatan segenap bangsa. Penanganan ancaman terorisme dilaksanakan dengan OMSP melalui pendekatan *preventif, koersif, preemptive atau represif*, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi yang dihadapi serta berdasarkan keputusan politik.

Penanganan dengan pola preventif lebih diutamakan dengan mengintensifkan fungsi intelijen, komando kewilayahan, serta unsur-unsur militer lainnya. Fungsi intelijen di setiap kesatuan dan strata, baik dalam wujud intelijen manusia maupun intelijen teknik, diberdayakan baik untuk mengungkap jaringan dan aktivitas di seluruh wilayah Indonesia maupun anasir-anasir dari luar wilayah Indonesia. Dengan semakin berkembangnya iptek, pelaku-pelaku aksi terorisme juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan aksinya. Dalam hal ini fungsi intelijen dalam penanganan terorisme harus mengoptimalkan kemampuan penginderaan dini berbasis intelijen manusia dan diperlengkapi dengan sarana teknologi yang mampu mendeteksi kegiatan dan keberadaan



pelaku kejahatan terorisme.

Komando Kewilayahan, yakni Komando Kewilayahan Darat, Komando Kewilayahan Laut, dan Komando Kewilayahan Udara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diberdayakan semaksimal mungkin untuk menjadi instrumen di daerah dalam membantu penanganan aksi terorisme. Keberadaan unsur-unsur kewilayahan dengan gelar kekuatan yang menjangkau sampai tingkat kecamatan, bahkan desa, menjadi faktor penangkalan yang cukup efektif untuk didayagunakan.

Setiap unsur TNI diberdayakan dalam penanganan ancaman terorisme, terutama dalam perannya sebagai badan pengumpul keterangan. Keberadaan setiap unsur TNI dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi faktor penangkalan untuk meniadakan setiap niat dan usaha pelaku kejahatan terorisme.

Penanganan dengan pola represif dilakukan oleh satuan khusus militer, yakni Satuan Penanggulangan Terorisme, Denjaka, dan Denbravo, yang telah dipersiapkan dan dilatih khusus untuk mengatasi aksi terorisme. Pola represif atau koersif dilaksanakan dengan operasi militer dalam bentuk serangan *preemptive* terhadap sarang teroris, operasi militer untuk menumpas jaringan teroris di seluruh wilayah Indonesia, serta operasi militer untuk pembebasan sandera di dalam dan di luar negeri.

Upaya penggunaan kekuatan pertahanan militer untuk penanganan terorisme dilaksanakan dengan tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak diskriminatif. Penanganan aksi terorisme internasional atau yang berkolaborasi dengan terorisme dalam negeri dilaksanakan secara lintas negara, lintas instansi secara terpadu, serta dapat bekerja sama dengan negara lain berdasarkan garis kebijakan pemerintah dan politik luar negeri.



Pelibatan unsur-unsur nirmiliter dalam penanganan isu terorisme yang sesuai dengan fungsinya akan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme. Pelibatan tersebut secara nyata diselenggarakan dengan memberdayakan instansi pemerintahan di semua lini untuk menertibkan administrasi kependudukan dalam rangka pengawasan kegiatan masyarakat. Khusus di pintu masuk Indonesia, seperti wilayah perbatasan, bandar udara internasional, dan pelabuhan internasional, untuk pengawasan lalu-lintas orang dan barang, perlu dikembangkan dengan suatu sistem pengawasan yang terpadu.

### *Menangani Ancaman Keamanan Laut*

Penanganan keamanan laut diarahkan untuk mewujudkan keamanan wilayah laut, keselamatan pelayaran, proteksi sumber daya alam, mobilitas di laut, dan pertahanan negara. Dalam konteks tersebut penanganan keamanan laut diselenggarakan untuk mengatasi jenis ancaman: ancaman navigasi dan pelayaran, kejahatan lintas negara di laut (seperti perompakan dan pembajakan), penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran lingkungan di laut, penyelundupan manusia, senjata dan bahan peledak, serta peredaran obat terlarang melalui laut.



Untuk mengatasi ancaman keamanan dan kejahatan lintas negara di laut pada dasarnya merupakan fungsi pertahanan militer yang dilaksanakan melalui OMSP. Penegakan keamanan di laut merupakan lingkup tugas polisional yang melekat pada unsur pertahanan militer



(Angkatan Laut) untuk menegakkan stabilitas keamanan di laut dalam wujud pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara yang mengganggu keamanan di laut Nusantara.

Penanganan kejahatan tersebut oleh unsur-unsur TNI berupa unjuk kekuatan sebagai penggentar dalam rangka pencegahan, unsur penindakan awal, termasuk juga dalam kekuatan gabungan bersama dengan unsur-unsur nirmiliter. Bentuk-bentuk penanganan oleh TNI untuk menegakkan keamanan di laut meliputi penyelidikan, pengejaran, penangkapan, dan penyidikan terhadap para pelaku tindak kejahatan di laut.

Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI berdasarkan jenis dan besarnya ancaman. Dengan menyadari bahwa dalam penanganan gangguan keamanan di laut terdapat instrumen pemerintah Indonesia yang lain, secara sinergi, TNI AL bekerja sama antar lembaga atau memanfaatkan wadah atau lembaga koordinasi yang ada.

Lapis pertahanan nirmiliter dalam upaya penanganan gangguan keamanan laut. Lapis pertahanan nirmiliter melalui fungsi-fungsi yang terlibat dalam wadah Badan Koordinasi Keamanan Laut merupakan instrumen terdepan untuk bersama-sama dengan lapis pertahanan militer dalam menegakkan wilayah laut Indonesia yang aman dan stabil.

Pelibatan unsur nirmiliter dalam penanganan ancaman keamanan di laut diselenggarakan secara fungsional, antara lain dengan menyusun program di bidangnya masing-masing, seperti menata dan membenahi sistem perizinan yang terintegrasi, membangun efek jera melalui peraturan perundangan yang diberlakukan, dan tidak tumpang-tindih dalam implementasi di lapangan.



Selain dengan peraturan perundang-undangan, penanganan juga diselenggarakan dengan pengawasan penataan sistem yang meliputi perambuan di alur pelayaran untuk kepentingan keamanan navigasi, penataan dan penertiban penggunaan alur pelayaran laut, serta keamanan ekosistem.

### *Menangani Ancaman Keamanan Dirgantara*

Penanganan keamanan dirgantara diarahkan untuk mewujudkan keamanan wilayah udara, keselamatan penerbangan, dan pertahanan negara. Dalam konteks tersebut penanganan



keamanan dirgantara diselenggarakan untuk mengatasi jenis ancaman, yaitu ancaman navigasi dan penerbangan, kejahatan lintas negara melalui udara, seperti pembajakan di udara, pencemaran lingkungan melalui udara, penyelundupan manusia, senjata, dan bahan peledak, serta peredaran obat-obatan terlarang melalui udara.

Mengatasi ancaman keamanan dan kejahatan lintas negara di udara pada dasarnya merupakan fungsi pertahanan militer yang dilaksanakan melalui OMSP. Pertahanan militer di bidang penegakan keamanan dirgantara menyelenggarakan fungsi pengamanan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman guna menegakkan stabilitas keamanan dirgantara Indonesia. Dalam menyelenggarakan fungsi pengamanan di udara unsur pertahanan militer mengemban fungsi penegak hukum di udara yang mencakup penyelidikan, pengejaran, dan penangkapan pelaku kejahatan di udara.



Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI berdasarkan jenis dan besarnya ancaman. Dengan menyadari bahwa penanganan gangguan keamanan di laut terdapat instrumen pemerintah Indonesia yang lain, TNI AU bekerja sama secara sinergi antar lembaga atau dengan memanfaatkan wadah atau lembaga koordinasi yang ada.

Lapis pertahanan nirmiliter dalam penanganan ancaman keamanan dirgantara diselenggarakan secara lintas instansi dengan lembaga pemerintah di luar pertahanan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Dalam lingkup fungsi dan kewenangannya menyusun program di bidangnya masing-masing, seperti menata dan membenahi sistem perizinan yang terintegrasi, membangun efek jera melalui peraturan perundangan yang diberlakukan, dan tidak tumpang-tindih dalam implementasi di lapangan.

Selain melalui peraturan perundang-undangan, juga diselenggarakan pengintegrasian sistem pengawasan dan kontrol terhadap ruang udara dan dirgantara, seperti radar sipil, sistem penginderaan dan peringatan dini, serta penertiban jalur penerbangan dan ruang orbit satelit. Lapis pertahanan nirmiliter melalui unsur-unsur yang diberi kewenangan berperan dalam menyidik dan mengadili pelaku tindak kejahatan dirgantara, penyusunan Jangkauan Informasi Penerbangan (FIR), rute penerbangan, dan Kawasan Informasi Pertahanan Udara (ADIZ).

### *Menangani Konflik Komunal*

Penanganan konflik komunal oleh lapis pertahanan militer diselenggarakan dalam kerangka pertahanan negara untuk menjamin keselamatan bangsa. Konflik komunal yang berimplikasi terhadap penggunaan kekuatan militer diletakkan pada kerangka tugas perbantuan



TNI untuk mencegah konflik agar tidak meluas sehingga membahayakan stabilitas nasional serta mengancam kelangsungan pembangunan nasional di wilayah tempat konflik tersebut berlangsung.

Pelibatan lapis pertahanan militer dalam mengatasi konflik memiliki sensitivitas yang tinggi serta potensi politisasi yang berdimensi pelanggaran terhadap atas hak asasi manusia. Maka, pelibatan TNI dalam penanganan konflik komunal berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilaksanakan dengan pola OMSP. Pelibatan lapis pertahanan militer dalam penanganan konflik komunal diselenggarakan secara seksama dan berdasarkan atas pembatasan lingkup tugas dan kewenangan yang jelas agar tidak merugikan kepentingan dan martabat TNI.

Penanganan konflik komunal oleh lapis pertahanan nirmiliter, pada hakikatnya, merupakan lingkup fungsi utama instansi pemerintah di luar pertahanan. Kewenangan penanganan berada dalam lingkup penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam negeri mulai dari pusat sampai dengan tingkat daerah, termasuk penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Unsur pertahanan nirmiliter dalam penanganan konflik komunal mencakupi pengedepanan pendekatan penegakan hukum, mempelajari akar permasalahan, dan meningkatkan kehidupan sosial. Penanganan konflik komunal mengedepankan pendekatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok yang bertikai. Unsur-unsur terkait harus mampu mempelajari akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik dan secara komprehensif mencari solusi terbaik yang dapat diterima pihak yang bertikai. Penanganan konflik komunal juga dilaksanakan dengan meningkatkan kehidupan sosial/masyarakat di berbagai aspek untuk menghindarkan mereka dari kesenjangan sosial, yang dapat menyulut konflik antar masyarakat.



### *Tugas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden*

Pengamanan terhadap Presiden RI dan Wakil Presiden RI berkaitan dengan penegakan kedaulatan negara di bidang pemerintahan negara. Presiden RI dan Wakil Presiden RI merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga dan



dilindungi. Pengamanan terhadap Presiden RI dan Wakil Presiden RI, termasuk keluarga Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai simbol negara dan simbol kedaulatan, tugas pengamanan terhadap Presiden RI dan Wakil Presiden RI menjadi tugas pokok TNI sebagai lapis pertahanan militer.

Tugas pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI oleh lapis pertahanan militer diselenggarakan melalui unit khusus TNI yang dipersiapkan dan disiagakan setiap saat untuk tugas tersebut. Penyelenggaraan pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dimaksud diselenggarakan oleh TNI, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden ketika berada di luar negeri diselenggarakan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dari negara setempat dengan memanfaatkan jalur kerja sama bilateral, termasuk kerja sama militer. Sebaliknya, penyelenggaraan pengamanan di wilayah NKRI diatur secara khusus dan dikoordinasikan dengan unsur-unsur keamanan setempat.



Keterlibatan lapis pertahanan nirmiliter dalam pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI bersifat tidak langsung, kecuali yang dilakukan oleh unsur Kepolisian Negara. Peran lapis pertahanan nirmiliter adalah dalam lingkup informasi intelijen atau yang terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat upaya pengamanan yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer.

### *Pengamanan Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis*

Objek vital strategis nasional termasuk ke dalam lingkup tugas pokok TNI dan mencakupi pengamanan terhadap Istana Negara atau Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden, serta bangunan-bangunan lain yang merupakan simbol negara, bangunan atau sarana dan prasarana yang mempunyai nilai sejarah atau menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia atau masyarakat internasional. Pengamanan terhadap objek vital nasional oleh lapis pertahanan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan fungsi pengamanan yang dilakukan oleh unsur keamanan lainnya.

Pengamanan oleh lapis pertahanan militer terhadap objek vital strategis nasional berdimensi pertahanan, yakni ditujukan kepada pengamanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan yang berdimensi ancaman militer, seperti pengeboman, aksi terorisme, atau tindakan sabotase. Pelaksanaan pengamanan oleh lapis pertahanan militer bertujuan untuk jangka panjang dan bernilai strategis yang diikuti dengan gelar Alutsisa, seperti sistem peluru kendali untuk penangkis serangan udara. Dalam kondisi keamanan yang normal, pengamanan objek vital tersebut dilaksanakan oleh lapis pertahanan militer dengan



OMSP. Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI disesuaikan dengan kondisi dan besaran tugas perlindungan yang disediakan.

Peran lapis pertahanan nirmiliter lebih bersifat pengamanan internal yang melekat pada manajemen objek vital tersebut. Unsur-unsur yang terlibat, seperti satuan keamanan internal (Satkam), termasuk ke dalam pengamanan yang dilakukan oleh unsur-unsur Kepolisian yang merupakan bagian dari peran lapis pertahanan nirmiliter.



### **PENANGANAN ANCAMAN NIRMILITER YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PERTAHANAN NEGARA MELALUI PERAN LINTAS LEMBAGA**

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2), sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Substansi Undang-Undang tersebut merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada pertahanan militer tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan.

Ancaman nirmiliter pada dasarnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, pada skala tertentu dapat bereskalasi atau berkembang luas sehingga mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya mengancam eksistensi negara. Ancaman nirmiliter ditangani dengan pendekatan nirmiliter, sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan dalam kondisi tertentu sebagai unsur bantuan. Di sinilah esensi dari Sistem Pertahanan Semesta yang diwujudkan dari keterlibatan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil dalam penanganan ancaman nirmiliter.



### **Menghadapi Ancaman Berdimensi Ideologi**

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi pada hakikatnya dihadapkan pada konsep strategi pertahanan berlapis. Lapis utama terdiri atas unsur pertahanan nirmiliter, yakni departemen/LPND yang membidangi ideologi. Strategi menghadapi ancaman berdimensi ideologi ditempatkan dalam kerangka bela negara yang perwujudannya melalui langkah-langkah politik yang dilaksanakan secara intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Langkah-langkah politik tersebut dapat dikembangkan baik dalam lingkup domestik maupun internasional sebagai bentuk perang ideologi dalam menghadapi penyebaran ideologi “asing”. Untuk mengefektifkan usaha pertahanan nirmiliter, unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri serta politik luar negeri bekerja sama untuk merumuskan pilihan strategi sesuai dengan derajat ancaman ideologi yang berkembang.

Unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mendinamisasi seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah untuk melaksanakan pilihan strategi yang telah dipersiapkan. Unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mendinamisasi jajarannya yang tersebar di setiap negara untuk melakukan langkah diplomasi dalam mengimbangi usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasi kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbang”. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi agar membentengi masyarakat



dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan, termasuk pengajaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari dalam negeri.

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ideologi membantu fungsi pertahanan nirmiliter yang menjadi unsur utama dalam menghadapi ancaman berdimensi ideologi, dengan mengembangkan pilihan strategi melalui intensifikasi pelaksanaan bakti TNI sesuai dengan wilayah kerja setiap kesatuan TNI. Dalam hal ini intensifikasi pelaksanaan bakti TNI diarahkan untuk mengembangkan komunikasi kepemimpinan sosial TNI (KKS TNI) serta materi nonfisik yang dipadukan dengan pilihan strategi yang diselenggarakan oleh unsur utama pertahanan nirmiliter. KKS TNI dan materi nonfisik tersebut dikemas dalam format kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara serta revitalisasi Pancasila untuk memperkuat pilihan strategi yang dikembangkan oleh unsur utama dari fungsi pertahanan nirmiliter.

Selanjutnya, unsur pemerintahan yang membidangi pertahanan bekerja sama dengan unsur pemerintahan lainnya di luar pertahanan diarahkan untuk mengintensifkan program pembinaan kesadaran bela negara dalam kerangka revitalisasi pemahaman dan pengamalan Pancasila yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman.

### **Menghadapi Ancaman Berdimensi Politik**

Upaya pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang berdimensi politik menempatkan unsur-unsur pertahanan nirmiliter di bidang politik sebagai kekuatan terdepan, yang dibantu oleh unsur-unsur nirmiliter lainnya, termasuk perkuatan dari unsur pertahanan



militer. Strategi menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni ke dalam dan ke luar. Pendekatan ke dalam ditempuh dengan membangun dan menata sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Sasaran pendekatan ke dalam adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang memberi efek penangkal yang tinggi serta ikut mempertinggi posisi tawar Indonesia pada forum internasional.

Penataan ke dalam diwujudkan ke dalam pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas dalam penguatan tiga pilar berikut.

*Pertama* adalah penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, dan bertanggung jawab, yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

*Kedua* adalah penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya; lembaga legislatif yang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi yang efektif dan kontekstual bagi kepentingan pembangunan nasional; lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, bukan atas kepentingan golongan atau pribadi; serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi.

*Ketiga* adalah penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi massa sebagai instrumen dalam pemberdayaan



masyarakat sebagai subjek politik dan subjek pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan haknya sebagai warga negara.

Pendekatan ke luar diarahkan untuk mendinamisasi strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara. Dimulai dari tataran internal, regional, dan supraregional hingga global.

Pada tataran internal, upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, iklim politik yang sehat dan membangun, serta kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan bersatu yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan tumbuhnya nasionalisme Indonesia.

Pada lingkup regional, politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama dengan negara lain sehingga tercipta kondisi saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Khusus untuk lingkup kawasan Asia Tenggara, politik luar negeri Indonesia dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan dalam merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera, serta memperkuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama. Indonesia harus tampil menjadi pelopor untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN,

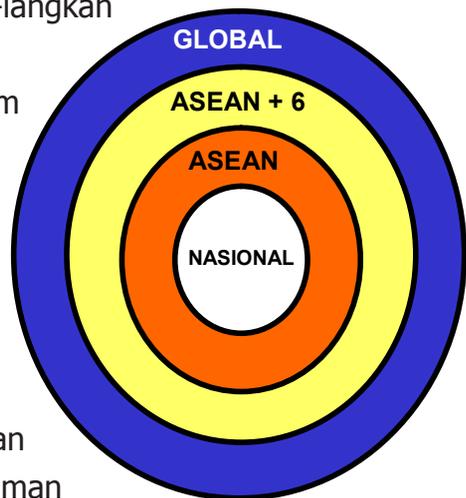


dan Masyarakat Budaya ASEAN.

Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus enam yang terdiri atas sepuluh negara anggota ASEAN bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta terwujudnya dalam kerja sama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN Plus Enam tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang memberi jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tidak adanya intervensi terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.

Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Forum Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, serta melakukan langkah-langkah pencegahan.

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks menyokong usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nirmiliter. Implementasi upaya pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman





berdimensi politik dapat berwujud peningkatan kesiapsiagaan kekuatan militer, pameran kekuatan, mengintensifkan diplomasi pertahanan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

### **Menghadapi Ancaman Berdimensi Ekonomi**

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dilaksanakan dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberi efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif, sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi.

Dalam kerangka pertahanan negara, aspek ekonomi memiliki peran vital dalam membangun pertumbuhan yang cukup tinggi, yang memungkinkan pembangunan pertahanan dapat ditingkatkan. Kondisi perekonomian nasional yang cukup tinggi niscaya menjadi daya tangkal pertahanan yang cukup efektif.

Tantangan perekonomian Indonesia ke depan dihadapkan dengan era Perdagangan Bebas ASEAN 2015 ketika produk-produk asing dapat masuk secara bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Orientasi pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk mengatasi pengangguran, tanpa menimbulkan efek bagi peningkatan inflasi, penetapan sistem ekonomi yang jelas, peningkatan pendapatan per kapita sampai pada kisaran US\$ 4000, serta mengatasi ketimpangan pada distribusi pendapatan.



Membangun dan menata sistem perekonomian nasional menghadapi era perdagangan bebas memerlukan integrasi upaya yang bersifat multisektoral serta mencakupi ekonomi makro dan mikro sekaligus. Dari sisi ekonomi makro, penataan sistem perbankan, fiskal, dan moneter merupakan agenda mendesak yang harus ditangani. Bersamaan dengan itu, pembangunan ekonomi mikro terus dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepastian tentang ketersediaan kebutuhan, terutama kepada sekitar 70% rakyat Indonesia yang memiliki ketergantungan pada sektor riil. Krisis ekonomi yang cukup berat sejak tahun 1998 perlu dijadikan pelajaran yang berharga dalam menentukan pilihan strategi sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak sosial yang fatal. Bidang yang mencakupi fiskal dan moneter menjaga agar nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tetap stabil serta sektor ekonomi mikro harus dijaga agar mampu bertahan.

Pembangunan dan penataan sistem ekonomi nasional diintensifkan secara bertahap dan berlanjut untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan. Strategi yang dikembangkan adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Salah satu sektor dalam penciptaan lapangan kerja adalah peningkatan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang disebar di seluruh daerah. Dalam rangka itu, pola kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta harus terus dikembangkan.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, eksploitasi yang berlebihan harus dapat dicegah dan sejak dini harus dikembangkan usaha-usaha pelestarian dan konservasi sehingga keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Khusus mengenai sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui, eksploitasinya, harus dibatasi melalui



suatu pengendalian yang ketat. Eksploitasi yang melibatkan pihak asing melalui kontrak berjangka panjang harus terus-menerus dikurangi dan diisi dengan peningkatan pelibatan pengusaha dalam negeri sehingga arus keuntungan lebih banyak mengalir di dalam negeri.

Pembangunan sektor ekonomi juga harus dapat dikelola pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Tantangan pembangunan nasional dalam beberapa dekade yang akan datang adalah peningkatan status daerah tertinggal yang jumlahnya hampir mencapai 50% (199 kabupaten yang tergolong tertinggal dari 457 kabupaten/kota di Indonesia). Ketahanan ekonomi di wilayah perbatasan menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya sabuk pengaman di wilayah tersebut. Pada saat ini terdapat 26 kabupaten yang tersebar di tiga wilayah perbatasan darat Indonesia, yakni di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, yang semuanya termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal. Ketertinggalan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dari segi pembangunan nasional (termasuk di bidang ekonomi) dikarenakan wilayah tersebut lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan serta tidak terjangkau oleh simpul-simpul pembangunan. Maka, ke depan kelemahan ini harus dapat diatasi dengan cara bertahap membangun sejumlah "kota orde" yang berfungsi sebagai simpul kemajuan untuk menjangkau sekaligus menopang terselenggaranya kesinambungan pembangunan di wilayah terpencil.

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas, dan kebutuhan pokok masyarakat,



terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Pemanfaatan program Bakti TNI dilakukan melalui kerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter untuk mendinamisasi masyarakat dalam mengatasi ancaman ekonomi yang dihadapi sehingga krisis segera dapat diatasi.

### **Menghadapi Ancaman Berdimensi Sosial Budaya**

Strategi untuk menghadapi ancaman sosial budaya dilaksanakan dengan pendekatan ke dalam dan ke luar. Secara konseptual, pemecahan isu kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan menjadi fokus strategi pertahanan nirmiliter di bidang sosial budaya. Langkah-langkah strategis ditempuh melalui pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan kepemimpinan yang diteladani, yang pelaksanaannya diselaraskan dengan pembangunan di bidang ekonomi. Pendidikan tidak sekadar bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat menanamkan hal fundamental, yakni wawasan kebangsaan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme.

Pendidikan harus dikelola secara profesional dengan orientasi membangun manusia Indonesia yang berkualitas berdaya saing untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, cerdas secara akademis, serta bermoral dan beretika. Sektor kesehatan harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai layanan publik untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Konsep layanan kesehatan masyarakat harus dapat dikemas dalam kerangka mempercepat pemberantasan kemiskinan, terutama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah.



Untuk itu, fungsi kontrol oleh pemerintah dan publik harus diefektifkan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan tataran operasional hingga ke daerah-daerah terpencil.

Penegakan hukum sangat vital dalam mengatasi ancaman berdimensi sosial. Penegakan hukum yang efektif harus dimulai dari membenahan kinerja aparat penegak hukum sehingga memberikan kepercayaan pada masyarakat akan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat tersebut akan mendatangkan kepatuhan masyarakat untuk menaati hukum. Penegakan hukum juga ditekankan pada penanganan penyebaran narkoba dan penyebaran virus HIV/AIDS, penanganan kasus-kasus kejahatan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Di atas semuanya, kepemimpinan yang diteladani menjadi kunci bagi terlaksananya strategi mengatasi isu-isu yang berdimensi sosial. Kepemimpinan yang diteladani harus dapat ditegakkan mulai dari tingkat nasional (eksekutif, legislatif, dan kekuasaan peradilan), di tingkat partai politik serta organisasi kemasyarakatan, ilmuwan, dan agama.

Strategi ke luar untuk menghadapi ancaman dari luar dilakukan dengan cara mengekspor produk-produk budaya Indonesia, antara lain, dalam bentuk sinetron, film, musik, kesenian, *bahasa yang berkarakter Indonesia* ke negara tetangga dan negara-negara di luar kawasan agar nilai-nilai keindonesiaan makin lama dapat mempengaruhi globalisasi. Pendidikan dan kesehatan juga harus dapat meningkatkan persaingannya di bidang mutu layanan dan manajemen pengelolaannya sehingga menjadi komoditas yang mampu bersaing dengan pihak asing di era globalisasi.

Selanjutnya, sistem pertahanan negara khususnya yang



membidangi sosial budaya melakukan upaya konkret untuk mampu menyaring nilai-nilai budaya asing serta mengontrol penyebarluasannya. Unsur utama pertahanan nirmiliter yang membidangi tata nilai sosial budaya mengembangkan pilihan strategi untuk mencegah dekadensi moral, melemahnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri, mudah dipengaruhi, serta kehilangan idealisme dan jati diri bangsa. Selanjutnya, mendinamisasi perkuatan karakter dan identitas bangsa Indonesia dilakukan dengan mengelola keberagaman masyarakat Indonesia dalam suku bangsa, bahasa, dan budaya sehingga menjadi kekuatan pemersatu bangsa dalam menggerakkan roda pembangunan nasional, sekaligus kekuatan yang mencegah nilai-nilai luar yang merugikan. Penghormatan terhadap keberadaan setiap etnik dengan budayanya masing-masing yang diwujudkan dalam pemberian hak politik, hak ekonomi, dan keadilan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi pertahanan nirmiliter yang membidangi informasi harus dapat mendorong insan pers dalam memberdayakan media cetak dan elektronik sebagai sarana pencerahan kepada masyarakat dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada sekadar mencari sensasi atau keuntungan materi.

Lapis pertahanan militer membantu fungsi pertahanan nirmiliter untuk mengembangkan nasionalisme dan memupuk tata kehidupan yang harmonis serta mewujudkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Keberadaan unsur pertahanan militer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat diberdayakan untuk membantu unsur pertahanan nirmiliter dalam mengakselerasi upaya mengatasi penyebarluasan nilai-nilai luar, yang merugikan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia.



### **Menghadapi Ancaman Berdimensi Berbasis Teknologi dan Informasi**

Sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi dan informasi menempatkan unsur pertahanan nirmiliter yang membidangi teknologi dan informasi sebagai unsur utama. Unsur utama tersebut mendinamisasi kekuatan dan kemampuan teknologi nasional untuk mengimbangi tekanan pihak luar yang menggunakan faktor teknologi yang melemahkan daya tangkal bangsa. Di samping itu, diperlukan upaya untuk mengelola teknologi dan informasi untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia yang menguasai dan memahami teknologi dan informasi tersebut.

Secara konkret, untuk menghadapi ancaman teknologi dan informasi, strategi pembangunan nasional di bidang teknologi dan informasi diselenggarakan untuk mewujudkan kemandirian industri nasional yang berdaya saing untuk mengimbangi kemajuan serta mengatasi ketergantungan teknologi dari negara-negara lain. Upaya kemandirian tersebut dikembangkan dalam menghasilkan produk-produk industri dalam negeri yang menguasai pasar domestik, serta mampu menerobos pasar regional dan supraregional dalam kerangka menjadikan Indonesia sebagai pemain dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang pertahanan, pembangunan teknologi diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa, yakni kemampuan untuk memproduksi sendiri kebutuhan pertahanan seperti pengembangan nano-teknologi, peluru kendali, persenjataan dengan sistem roket yang dikendalikan oleh satelit, alat komunikasi pertahanan, bahan peledak, propelan, serta bidang otomotif dengan memproduksi mesin-mesin kendaraan taktis hingga kendaraan tempur berat.



Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang berdimensi teknologi dan informasi berperan untuk memberikan bantuan perkuatan terhadap unsur utama pertahanan nirmiliter. Pilihan strategi dalam konteks ancaman berdimensi teknologi dan informasi diselenggarakan dengan memberdayakan bidang penelitian dan pengembangan teknologi yang dimiliki dalam mendeteksi ancaman, serta membantu mengakselerasi usaha kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Pilihan strategi dimaksud juga dikembangkan dengan cara membangun komitmen untuk sebesar-besarnya memanfaatkan produk dalam negeri dalam pembangunan Postur Pertahanan Negara sebagai stimulis yang mendorong industri dalam negeri agar lebih bergairah mengembangkan usahanya.

### **Menghadapi Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum**

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman keselamatan umum menempatkan unsur-unsur pemerintahan di bidang keselamatan umum sebagai unsur utama. Fungsi keselamatan umum bersifat multi-instansi yang mencakupi, antara lain, penanganan terhadap penanggulangan dampak bencana alam dan bencana buatan manusia, penyakit pandemik, keselamatan transportasi, serta pengungsian.

Strategi penanganan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan umum memerlukan suatu manajemen yang mengintegrasikan fungsi-fungsi pemerintahan dan nonpemerintahan serta dalam satu kesatuan pengendalian. Strategi yang digunakan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi keselamatan umum meliputi peringatan dini, mitigasi, dan penanganan mulai tangga darurat sampai



dengan rehabilitasi.

Dalam hal keselamatan umum menyangkut penanganan wabah penyakit pandemik, instrumen penanganan yang dikedepankan adalah unsur kesehatan atau pertanian, bergantung kepada titik berat bahaya yang dihadapi serta dibantu oleh unsur-unsur dari sektor yang lain.

Dalam hal ancaman keselamatan umum menyangkut penanggulangan dampak bencana alam, unsur utama bertindak untuk mendinamisasi kekuatan nasional untuk penanganan pengungsian, pencarian korban, serta usaha-usaha konkret untuk mengatasi dampak bencana serta langkah-langkah rekonstruksi.

Lapis pertahanan militer dalam hal keselamatan umum menyangkut penanganan dampak bencana alam berskala besar menggerakkan TNI berfungsi sebagai kekuatan yang siap dikerahkan dan digunakan untuk membantu unsur-unsur pertahanan nirmiliter lainnya. Pelibatan TNI dalam penanganan bencana alam tersebut merupakan pelaksanaan dalam kerangka OMSP. Dalam kerangka penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, sektor pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang selama ini telah menunjukkan kinerjanya secara baik. Peran aktif TNI dalam menanggulangi dampak bencana yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia selama ini membuktikan bahwa TNI memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan untuk tampil sebagai instrumen negara yang diandalkan.

Untuk menghadapi kemungkinan pelibatan TNI dalam tugas-tugas serupa di masa datang, pemerintah akan lebih memberdayakan kemampuan TNI yang meliputi bidang manajemen, keterampilan prajurit, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam bidang manajemen, upaya peningkatan diarahkan pada penataan organisasi,



mekanisme kerja, sistem komando dan pengendalian serta hubungan antardepartemen/lembaga. Dalam bidang keterampilan prajurit, upaya diwujudkan dalam pengembangan fungsi dan peran kelembagaan TNI yang mampu membekali prajurit dengan keterampilan yang diperlukan dalam tugas-tugas penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, serta pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam hal dukungan sarana dan prasarana pelaksanaannya ditempuh melalui upaya memperlengkapi TNI dengan Alutsista yang menjamin mobilitas TNI serta alat peralatan modern yang dapat digunakan selain untuk kepentingan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer juga dapat dimanfaatkan dalam tugas-tugas penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan.

### **Tugas Perbantuan TNI**

Selain pelibatan lapis pertahanan militer dalam penanganan ancaman nirmiliter seperti diuraikan di atas, lapis pertahanan militer, yakni TNI, dapat terlibat dalam beberapa tugas perbantuan. Tugas perbantuan tersebut adalah bantuan pengamanan tamu negara, bantuan kepada Pemda, bantuan SAR, dan bantuan pemberdayaan wilayah.

#### *Tugas TNI dalam Pemberdayaan Wilayah Negara*

Salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Tugas tersebut diselenggarakan TNI melalui OMSP. Strategi pemberdayaan wilayah negara disusun oleh Departemen Pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI sebagai pengembalian fungsi pelaksana tugas dan fungsi pertahanan negara (PTF Hanneg) di daerah.



Pemberdayaan wilayah negara diwujudkan melalui peran TNI dalam membantu pemerintah di bidang penataan ruang, kegiatan survei dan pemetaan, serta penyiapan daerah dengan bekerja sama dengan unsur pemerintah yang membidangnya untuk mendorong pembangunan nasional yang diintegrasikan dengan penyiapan logistik wilayah untuk kepentingan pertahanan. Pemberdayaan wilayah negara juga mencakup pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar. Pengamanan wilayah perbatasan yang dilaksanakan TNI dengan menempatkan kekuatan TNI sebagai penjaga perbatasan telah memberikan efek penangkalan yang tinggi serta mampu mencegah dan menekan tindak kejahatan lintas negara yang melalui wilayah perbatasan sampai pada titik terendah. Keberadaan TNI di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia juga telah memberikan efek pembangunan nasional yang sangat berarti, yakni mendorong daerah-daerah pertumbuhan baru, baik di bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Ke depan, langkah tersebut dikembangkan melalui kerja sama antar departemen/lembaga sebagai model untuk pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara terpadu untuk yang dikembangkan di masa datang.

### *Bantuan TNI pada Tugas Pemerintahan di Daerah*

Bantuan TNI kepada pemerintah daerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau kota pada dasarnya merupakan bantuan TNI dalam kerangka keselamatan umum yang pelaksanaannya melalui OMSP. Penyelenggaraannya berdasarkan permintaan bantuan militer oleh Pemda yang bersangkutan untuk menangani suatu tindakan darurat, termasuk dalam kerangka pelaksanaan program TNI yang



terkoordinasi seperti Bakti TNI. Dalam kondisi ketika Pemda menghadapi suatu kesulitan atau kondisi darurat yang memerlukan bantuan TNI, Pemda dapat mengajukan bantuan TNI tersebut kepada Panglima atau Komandan Militer setempat. Atas dasar permintaan tersebut Panglima TNI atau Komandan Militer setempat menunjuk satuan TNI yang akan ditugaskan menurut kebutuhan.

Jenis-jenis bantuan TNI yang dapat dimintakan oleh Pemda dan diberikan oleh TNI disesuaikan dengan kemampuan TNI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan Pemda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Komando Militer setempat atas dasar pertimbangan tugas TNI yang lebih mendesak atau karena pertimbangan tugas yang lebih strategis, secara hierarki Komandan Militer setempat menyampaikan kepada Panglima TNI tentang hal tersebut guna penyelesaian lebih lanjut.

### *Bantuan TNI kepada Kepolisian Negara*

Bantuan TNI kepada Kepolisian pada hakikatnya merupakan bantuan TNI dalam kerangka penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan melalui OMSP. Penyelenggaraannya berdasarkan permintaan pihak Kepolisian kepada TNI yang disampaikan secara hierarkis kepada Panglima TNI. Lingkup tugas dalam permintaan bantuan TNI disesuaikan dengan kemampuan dan/atau kemahiran prajurit TNI serta dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI berdasarkan jenis dan besarnya ancaman.

Dalam hal permintaan bantuan TNI oleh Kepolisian tersebut tidak



dapat dipenuhi oleh komando militer setempat atas dasar pertimbangan tugas TNI yang lebih mendesak atau karena pertimbangan tugas yang lebih strategis, secara hierarkis Komando Militer setempat menyampaikan kepada Panglima TNI tentang hal tersebut guna penyelesaian lebih lanjut.

### *Pengamanan Tamu Negara*

Tugas TNI mencakup pula pengamanan tamu negara, yakni pengamanan terhadap tamu negara setingkat kepala negara serta perwakilan negara asing yang berada di Indonesia. Dalam hal Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara lain tersebut menyertakan unsur pengamanan dari negaranya sendiri; pelaksanaannya diselenggarakan oleh TNI atau dalam kondisi khusus melalui jalur kerjasama bilateral yakni kerjasama antar militer kedua negara. Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI dengan disesuaikan dengan kondisi dan besaran tugas pengamanan.

### *Bantuan TNI Dalam Pencarian dan Pertolongan (SAR)*

Bantuan TNI dalam pencarian dan pertolongan *Search And Rescue* (SAR) diselenggarakan TNI dengan mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelamatkan korban dengan cara bekerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter. Pemberian bantuan SAR merupakan bagian dari OMSP, yang pelaksanaannya dikoordinasikan TNI dengan pihak yang membutuhkan bantuan.



Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan SAR, TNI dapat bekerja sama secara sinergi antarlembaga atau dengan memanfaatkan wadah atau lembaga koordinasi yang ada.



### **KERJASAMA PERTAHANAN DAN PERDAMAIAN DUNIA**

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, serta posisi Indonesia yang bertetangga dengan sejumlah negara, kepentingan nasional di bidang pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional tetapi juga internasional. Kenyataan tersebut mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama dengan negara lain sebagai kepentingan pertahanan negara yang akan ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang.

#### **Lingkup dan Esensi Kerja Sama Pertahanan**

Esensi kerja sama pertahanan yang diselenggarakan Indonesia adalah untuk membangun saling percaya antar bangsa sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain. Kerja sama pertahanan juga bertujuan membangun kapabilitas pertahanan, melalui pengadaan Alutsista yang strategis, transfer teknologi, dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI.

Dalam konteks tersebut, kerja sama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa di dunia melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret dan bermartabat.

Pada tataran regional, kerja sama pertahanan diarahkan bagi



terwujudnya kawasan regional yang stabil melalui upaya bersama antarnegara di kawasan, serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing dan tidak saling mengintervensi urusan negara lain. Kerja sama pertahanan pada lingkup regional akan diutamakan dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dalam usaha untuk memelihara dan memperkuat stabilitas keamanan kawasan. Selain dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, juga dengan negara-negara luar Kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia serta negara-negara besar dan yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan, termasuk mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Kerja sama pertahanan dengan negara lain, selain untuk tujuan perdamaian dunia dan stabilitas regional, juga dilakukan untuk kepentingan pembangunan kapabilitas pertahanan negara Indonesia, yang mencakupi peningkatan profesionalitas prajurit, peningkatan kemampuan Alutsista, serta transfer teknologi menuju kemandirian sarana pertahanan Indonesia.

### **Paradigma Kerja Sama Pertahanan**

Kerja sama pertahanan merupakan sarana pengembangan diplomasi pertahanan untuk membangun komunikasi dan saling percaya dengan negara lain. Kerja sama pertahanan dengan negara lain baik di kawasan maupun di luar kawasan dikembangkan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kerja sama pertahanan tidak mengarah kepada pembentukan pakta pertahanan. Penyelenggaraan kerja sama pertahanan lebih dikembangkan dalam model kerja sama bilateral untuk membangun saling percaya, mengkomunikasikan isu-isu



keamanan yang dapat ditangani secara bersama, termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara. Dalam konteks tersebut paradigma kerja sama, seperti dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis yang sudah dilaksanakan dengan beberapa negara besar akan lebih dikembangkan dengan negara-negara yang lain, serta menyentuh substansi pertahanan yang lebih komprehensif.

Kerja sama pertahanan pada lingkup regional di Kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan yang berbatasan dengan Indonesia diselenggarakan untuk mengatasi isu-isu keamanan bersama, serta saling memberikan bantuan dalam kerangka resolusi konflik, dan mengatasi bencana alam yang berskala nasional. Dalam konteks tersebut, kerja sama pengamanan Selat Malaka masih akan dipertahankan dan menjadi model untuk menyusun kerja sama pertahanan kawasan dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dalam penanganan isu-isu keamanan bersama yang disesuaikan dengan paradigma dan perkembangan politik luar negeri Indonesia.

### **Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional**

Indonesia memiliki komitmen untuk memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan persamaan hak dan kedudukan, menghargai kedaulatan tiap negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Komitmen tersebut didasarkan pada cara pandang bahwa Indonesia tidak mungkin dapat hidup tenteram dalam dunia yang kondisinya tidak stabil. Konflik di kawasan dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kondisi keamanan dalam negeri. Atas dasar itu,



Indonesia akan senantiasa mengambil bagian untuk bekerja sama dengan negara-negara lain sebagai masyarakat internasional dalam usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan di berbagai kawasan yang mengancam atau mengganggu stabilitas dan perdamaian dunia.

Keikutsertaan Indonesia melalui usaha-usaha pertahanan di berbagai kawasan semakin membangun kepercayaan dunia tentang peran penting dan kinerja Indonesia sebagai mitra strategis masyarakat internasional dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.

Dalam mewujudkan perdamaian dunia, sektor pertahanan negara Indonesia telah mengambil peran aktif selama bertahun-tahun dan mengukir prestasi yang membanggakan. Peran aktif pertahanan negara tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Indonesia dalam tugas-tugas perdamaian dunia yang diemban oleh TNI dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia baik melalui Kontingen Garuda maupun sebagai pengamat perdamaian di sejumlah negara. Keikutsertaan TNI sejak tahun 1957 melalui Kontingen Garuda I (KONGA I) di Mesir hingga yang terakhir di Lebanon melalui Kontingen Garuda XXIII, menunjukkan komitmen yang tinggi dari bangsa Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi. Prestasi Kontingen Garuda serta pengamat perdamaian yang membanggakan tersebut semakin membangun kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola pertahanannya serta memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia.





Pada lingkup regional, sektor pertahanan akan meningkatkan perannya untuk membantu negara-negara tetangga yang memerlukan bantuan TNI. Bantuan tersebut mencakup bantuan untuk penanggulangan konflik internal melalui kerja sama dengan pemerintah negara setempat yang memerlukan sesuai dengan permintaan. Dalam rangka itu, pengalaman dan prestasi Indonesia akan menjadi kunci untuk membantu negara lain bagi terwujudnya kawasan yang stabil dan aman. Bantuan TNI juga mencakupi upaya penanggulangan dampak bencana alam yang menimpa negara-negara di kawasan. Dalam rangka itu, TNI sebagai kekuatan siap, serta sarat dengan pengalaman dalam penanggulangan dampak bencana alam, akan disiapkan secara sungguh-sungguh untuk menghadapi tugas-tugas bantuan di lingkup regional dalam waktu-waktu akan datang.

Disadari bahwa perkembangan global yang semakin kompleks serta kondisi keamanan yang tidak menentu berimplikasi terhadap kebutuhan untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dan lebih prima. Dalam rangka itu, agenda peningkatan kemampuan TNI dalam mengemban tugas-tugas perdamaian dunia dan tugas pertahanan di kawasan diarahkan untuk menjadi kontingen dunia yang disegani dan dipercaya oleh komunitas internasional. Upaya konkret yang dilakukan, melalui pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI), serta peningkatan kemampuan dan keterampilan prajurit TNI untuk mengemban tugas perdamaian dunia. PMPP TNI secara terstruktur berada dibawah Markas Besar TNI dengan tugas mempersiapkan pasukan TNI yang akan melaksanakan tugas operasi perdamaian dunia. PMPP TNI tersebut memiliki fungsi dan peran yang strategis sehingga perlu diberdayakan secara sungguh-sungguh. Prakondisi untuk tampil menjadi kontingen kelas dunia yang disegani adalah dengan membangun kemampuan Alutsista dan peralatan yang



modern dan diperlukan untuk menyelenggarakan tugas perdamaian dunia. Kebutuhan memperlengkapi diri dengan alat utama sistem senjata yang mendukung mobilitas serta memproteksi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam selama dalam tugas perdamaian dunia akan menjadi prioritas untuk direalisasikan, di antaranya dengan membangun dan mengembangkan kesatuan-kesatuan pemelihara perdamaian mekanis yang sewaktu-waktu siap digerakkan.

Selain dari segi Alutsista dan peralatan, kerja sama pertahanan di masa datang akan semakin mengarah kepada tugas-tugas operasi militer dalam mengatasi dampak bencana alam, seperti tsunami dan gempa bumi, serta tugas kemanusiaan lainnya yang melibatkan banyak negara. Dalam rangka itu akan dikembangkan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan internasional seperti penyusunan prosedur standar operasi, latihan bersama dengan negara lain, baik latihan bersama di lapangan atau medan latihan maupun dalam bentuk seminar, lokakarya, atau gladi.



## **PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA**

Terdukungnya strategi pertahanan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pertahanan negara. Kemampuan pertahanan negara hanya dapat terwujud melalui suatu usaha pembinaan yang diselenggarakan dengan pola pembinaan yang dirancang secara jelas disertai dengan prinsip-prinsip dan sasaran pembinaan.

### **Pokok-Pokok Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara**

Pembinaan kemampuan pertahanan negara pada hakikatnya merupakan pembinaan segenap sumber daya nasional, dilaksanakan sejak dini ke dalam komponen-komponen pertahanan negara, yakni Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dalam rangka mewujudkan suatu sistem pertahanan negara.

Pada masa damai, pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal nasional, baik secara militer maupun nirmiliter. Pada masa perang, pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mendinamisasi segenap sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan untuk mendukung keberlanjutan perang sampai peperangan dapat dimenangkan. Pada masa pasca perang, pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mengembalikan kemampuan pertahanan yang terkena kerusakan atau dampak perang.

Pembinaan kemampuan pertahanan militer dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan dan TNI



yang diwujudkan dalam pembangunan postur TNI. Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara yang diproyeksikan dalam 20 tahun mendatang sampai dengan tahun 2029. Untuk dapat mewujudkan pembangunan postur TNI ditentukan oleh komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skema anggaran yang mampu menjamin kesinambungan rencana pembangunan pertahanan jangka panjang.

Lingkup kewenangan pembinaan berada pada Departemen Pertahanan yang mencakupi penetapan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, perumusan kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI, penetapan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi, dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI.

Lingkup Kewenangan pembinaan TNI mencakupi pembinaan profesi TNI, pembinaan kekuatan TNI, pemeliharaan kesiapsiagaan operasional, serta pemenuhan kebutuhan TNI dengan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan.

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh departemen/LPND melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing dan dikoordinasikan dengan departemen pertahanan. Lingkup pembinaan yang dikoordinasikan mencakupi aspek bela negara, penyiapan sumber daya nasional untuk pertahanan, serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara di bidangnya. Dalam rangka keikutsertaan warga negara dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara, departemen/LPND menyelenggarakan fungsi pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pendidikan bela negara. Dalam rangka pembentukan komponen



pertahanan negara, departemen/LPND memiliki peran dalam penyiapan sumber daya nasional untuk direkrut menjadi Komponen Cadangan serta pemberdayaan sumber daya nasional untuk menjadi Komponen Pendukung. Dalam bidang pertahanan sipil, departemen/LPND menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk mengatasi ancaman nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsinya. Tanggung jawab departemen/LPND di luar bidang pertahanan teraktualisasi dalam perumusan kebijakan di bidangnya yang berdimensi pertahanan, baik untuk menghadapi ancaman militer maupun dalam kerangka pertahanan sipil.

Pembinaan kemampuan bersifat nasional yang mencerminkan kesemestaan bertumpu pada sumber daya manusia sebagai pusat kekuatan pertahanan negara, didukung oleh sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial dalam pengejawantahan sistem pertahanan rakyat semesta yang tanggap, tanggon dan trengginas.

Pembinaan kemampuan pertahanan dipersiapkan dan diselenggarakan sejak dini dan berkesinambungan, dengan mengandalkan kemampuan sendiri serta percaya pada kekuatan sendiri.

### **Sasaran Pembinaan Kemampuan Pertahanan Militer**

Pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan untuk membina komponen utama pertahanan negara, yakni TNI yang profesional untuk memiliki kemampuan yang andal dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal, penindak, dan pemulih NKRI.

Pembinaan kemampuan pertahanan TNI dilaksanakan melalui pola Tri-Matra Terpadu yang saling mengisi dan saling memperkuat.

Sebagai komponen utama, sasaran pembinaan kemampuan TNI



adalah untuk memiliki kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, dan kemampuan dukungan, serta kemampuan pemberdayaan wilayah.

### *Kemampuan Intelijen*

Kemampuan Intelijen mencakup kemampuan intelijen strategis dan kemampuan intelijen pertempuran. Kemampuan intelijen strategis mencakup kemampuan berikut. *Pertama* adalah kemampuan menganalisis perkembangan lingkungan strategis, termasuk perkembangan situasi dalam negeri yang diperlukan dalam memetakan gejala, potensi ancaman atau ancaman nyata yang membahayakan atau mengancam NKRI. *Kedua* adalah kemampuan melaksanakan penyelidikan, penginderaan, dan pendeteksian dini terhadap setiap gejala atau kemungkinan ancaman yang dapat membahayakan atau mengancam NKRI. *Ketiga* adalah kemampuan melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, perang urat saraf, penyesatan, dan perang informasi. *Keempat* adalah kemampuan melaksanakan kegiatan kontra-intelijen, lawan spionase, lawan infiltrasi, serta lawan sabotase.

Kemampuan Intelijen Pertempuran mencakup yang berikut. *Pertama*, kemampuan menganalisis faktor-faktor militer dari cuaca, medan, dan musuh bagi kepentingan pertempuran. *Kedua*, kemampuan melaksanakan penyelidikan, penginderaan, dan pendeteksian dini terhadap setiap perkembangan kegiatan musuh bagi kepentingan strategi dan taktik pertempuran. *Ketiga*, kemampuan melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, perang urat saraf, penyesatan, dan perang informasi bagi kepentingan pertempuran. *Keempat*, kemampuan melaksanakan kegiatan kontra-intelijen, lawan spionase, lawan infiltrasi, serta lawan sabotase bagi kepentingan pertempuran.



### *Kemampuan Pertahanan*

Kemampuan pertahanan yang dikembangkan adalah berikut. *Pertama*, kemampuan pertahanan udara nasional yang mampu mengamankan NKRI yang terdiri atas kemampuan pertahanan udara areal, pertahanan udara terminal, dan pertahanan udara titik. *Kedua*, kemampuan pertahanan udara nasional yang mampu memberikan keleluasaan bagi matra laut dan darat dalam mengembangkan strategi pertempuran melalui payung udara dan bantuan tembakan yang maksimal. *Ketiga*, kemampuan pemukul strategis yang mengintegrasikan pertahanan udara, laut, dan darat yang dapat menghancurkan atau menghambat musuh yang hendak melakukan invasi ke wilayah NKRI, mulai dari luar batas ZEE, termasuk dalam penanganan dua daerah krisis sekaligus. *Keempat*, kemampuan pertahanan wilayah yang bertumpu pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil. *Kelima*, kemampuan perang semesta yang bertumpu pada perang gerilya yang mobil dan menghancurkan serta berkelanjutan. *Keenam*, kemampuan perlawanan teknologi dan elektronika strategis untuk mengamankan sistem komunikasi dan pancaran elektronika sendiri, serta mengacaukan sistem komunikasi dan pancaran elektronika lawan.

### *Kemampuan Keamanan*

Pembinaan kemampuan keamanan mencakupi empat aspek berikut. *Pertama*, kemampuan pengamanan dalam rangka menegakkan stabilitas keamanan di laut dan udara nasional sesuai dengan lingkup tugas TNI., yang diwujudkan dalam membangun dan meningkatkan profesionalisme SDM yang didukung oleh Alutsista yang memadai. *Kedua*, kemampuan



untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman dan gangguan dari dalam negeri, antara lain separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata dan teroris bersenjata. Hal itu diwujudkan dalam kemampuan dan keterampilan prajurit, mobilitas yang didukung oleh Alutsista yang andal dan logistik yang memadai serta moral yang tinggi. *Ketiga*, kemampuan penanggulangan dalam rangka kesiapan TNI apabila ditugasi untuk mengatasi kerusuhan massal, penanganan bencana alam, bantuan terhadap Kepolisian, dan bantuan kepada Pemda serta bantuan SAR. Diwujudkan dalam kemampuan interoperabilitas SDM dan peralatan yang digunakan, serta kelengkapan peranti berupa tataran kewenangan serta prosedur standar operasi. *Keempat*, kemampuan untuk melindungi diri dan kesatuan dari ancaman teroris, sabotase, spionase, atau tindakan anarkis. Hal itu diwujudkan dengan membangun unit-unit khusus yang berkemampuan tinggi, efektif serta dilengkapi dengan peralatan yang berpresisi tinggi untuk mencegah dampak pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dan demokrasi.

### *Kemampuan Dukungan*

Dalam pertahanan militer, kemampuan dukungan merupakan unsur vital dalam pencapaian usaha pertahanan militer. Oleh karena itu, kemampuan dukungan harus dibina dan dikelola secara tepat dan profesional. Kemampuan dukungan dapat berupa dukungan berdimensi fisik dan nonfisik. Kemampuan dukungan fisik mencakupi logistik, transportasi, dan kesehatan, sedangkan kemampuan dukungan nonfisik meliputi komunikasi dan informasi (termasuk media pemberitaan), moral, administrasi-manajemen, serta iptek.



Dengan didasarkan pertimbangan geografi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya, pembinaan kemampuan dukungan yang terpusat harus pula dikembangkan ke dalam pola-pola pembinaan kewilayahan.

Pembinaan kemampuan dukungan terpusat disesuaikan dengan dinamika dan strategi pertahanan, baik yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Pembinaan kemampuan dukungan kewilayahan berdasarkan strategi pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam dalam melaksanakan perang rakyat semesta, meliputi tenaga manusia, perbekalan daerah/wilayah, sarana prasarana, serta pranata sosial daerah yang diperlukan. Unsur dukungan yang menentukan meliputi dukungan moral, dukungan administrasi, dan dukungan bidang Iptek. Dukungan moral dikembangkan dalam menjaga kesinambungan usaha dan daya tempur, yang meliputi pendidikan dan latihan, kesejahteraan, kepemimpinan, disiplin, serta jiwa korsa. Kemampuan dukungan administrasi dan manajemen dikembangkan dalam rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian bagi terselenggaranya fungsi pertahanan dari aspek militer. Kemampuan dukungan iptek dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pertahanan.

### *Kemampuan Pemberdayaan Wilayah*

Salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cakupan penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan, pelatihan dasar kemiliteran, serta pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tugas tersebut diselenggarakan TNI melalui OMSP. Tugas pemberdayaan membutuhkan



kecakapan atau keahlian khusus, yang mencakup penguasaan karakteristik wilayah serta sumber daya yang ada di wilayah negara. Kemampuan pemberdayaan wilayah juga menyangkut penyiapan segenap sumber daya nasional yang meliputi wilayah negara beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan OMP pada saat diperlukan. Pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan negara dan kondisi keamanan negara yang berkembang.

### **Sasaran Pembinaan Kemampuan Pertahanan Nirmiliter**

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter tidak diarahkan untuk menjadikan rakyat sipil sebagai tameng dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain. Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter adalah dalam rangka memelihara kelangsungan hidup bangsa dan NKRI, yang diarahkan pada sasaran tumbuhnya peran serta rakyat dalam pertahanan negara melalui profesi, pengetahuan, dan keahlian, serta kecerdasan sebagai unsur yang memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI. Pembinaan pertahanan nirmiliter pada dasarnya diintegrasikan dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter, selain untuk membangun daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman, juga untuk mewujudkan daya tahan bangsa dari segala aspek kehidupan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan khususnya menghadapi ancaman nirmiliter.

Pembinaan pertahanan nirmiliter mencakup pembinaan terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan,



sarana dan prasarana, wilayah negara, serta faktor-faktor non-fisik. Dalam rangka Sistem Pertahanan Semesta, pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk terwujudnya komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan dibentuk untuk digelar di tiap kabupaten dan kota dengan kekuatan sekitar satu detasemen sampai satu batalyon.

### *Pembinaan Sumber Daya Manusia*

Pembinaan sumber daya manusia berada dalam lingkup kewenangan lintas instansi pemerintah yang mencakupi pengelolaan komposisi dan penyebaran penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, hukum, dan ekonomi.



Pembinaan SDM dalam kerangka pertahanan negara berorientasi pada penanaman patriotisme dan nasionalisme bagi terwujudnya rasa cinta tanah air dan rasa memiliki NKRI, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta bangga menjadi bangsa Indonesia.

Pembinaan kesadaran bela negara ditujukan bagi setiap warga negara agar memiliki kesiapan secara psiko-intelektual kebangsaan, untuk ditransformasikan menjadi komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer sesuai dengan profesinya menjadi unsur kekuatan bangsa untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara dilaksanakan dalam rangka membangun daya tangkal bangsa secara terpadu.



### *Pembinaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan*

Pembinaan diarahkan pada usaha-usaha pengelolaan, eksploitasi, dan pengembangan SDA dan SDB yang bernilai strategis untuk kesejahteraan masyarakat serta berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dalam pembinaan SDA dan SDB melalui penyiapan dan pengembangan cadangan materiil strategis serta logistik wilayah pertahanan.

Pembinaan SDA dan SDB dalam rangka transformasi sumber daya nasional yang bersifat potensi menjadi kekuatan pertahanan yang diwujudkan dalam pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung. Pembinaan SDA dan SDB untuk menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung dikoordinasikan oleh Departemen Pertahanan dengan instansi-instansi pemerintah yang secara fungsional menjadi pembina SDA dan SDB yang bersangkutan.

### *Pembinaan Sarana dan Prasarana*

Pembinaan sarana dan prasarana dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan sekaligus dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan. Pembangunan sarana dan prasarana semaksimal mungkin menyinkronkan kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan. Dalam konteks tersebut, pembangunan prasarana transportasi dan perhubungan seperti jalan tol atau jalan bebas hambatan memperhatikan kepentingan strategi pertahanan, antara lain menyangkut konstruksinya dipersiapkan untuk dapat dilalui oleh kendaraan lapis baja dan pada bagian-bagian tertentu disiapkan untuk landas pacu pesawat. Demikian pula halnya dengan prasarana pelabuhan udara dan pelabuhan laut dipersiapkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan



manakala negara dalam keadaan darurat.

Bagian vital dari pembinaan sarana dan prasarana adalah pembinaan ilmu pengetahuan dan pengembangan industri dan teknologi yang diarahkan untuk kemandirian sarana pertahanan. Salah satu prioritas adalah pengembangan iptek melalui riset teknologi untuk menghasilkan prototipe Alutsista dan perlengkapan untuk pertahanan yang dapat dikembangkan oleh industri pertahanan dalam negeri. Dalam hal ini pembangunan industri pertahanan strategis menjadi bagian bagian vital dari strategi pertahanan, yakni mewujudkan kemandirian pertahanan serta menghasilkan daya tangkal yang tinggi.

Lingkup pengembangan sarana dan prasarana dikembangkan mulai dari pembinaan SDM, transfer teknologi, serta rekayasa teknologi untuk Alutsista dan peralatan pertahanan untuk dikembangkan dan menjadi produksi dalam negeri. Dalam hal ini kerja sama pertahanan dengan negara lain, termasuk kegiatan pengadaan Alutsista dari luar negeri, harus dapat mengakomodasi sebesar-besarnya kepentingan transfer teknologi.

### *Pembinaan Wilayah*

Pembinaan wilayah untuk kepentingan pertahanan, yakni berupa penataan ruang yang memadukan kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan. Pembinaan wilayah dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan dikelola dengan memperhatikan hak masyarakat dan kepentingan umum. Pembinaan wilayah didayagunakan bagi kepentingan instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen. Pembinaan batas wilayah sebagai acuan penyelenggaraan fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.



Pembinaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan wujud upaya menegakkan hak kedaulatan wilayah NKRI. Pembinaan wilayah darat, laut dan udara merupakan satu kesatuan pertahanan nasional yang utuh dan menyeluruh dalam mewujudkan kepentingan nasional dan tujuan nasional. Pengelolaan wilayah antariksa untuk kesejahteraan dan pertahanan negara secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan iptek.

### *Pembinaan Faktor-Faktor Nonfisik*

Memasyarakatkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus tata nilai yang mempersatukan dan mengelola kebhinekaan bangsa Indonesia dalam suku, agama, ras, dan antargolongan, tetapi menjadi satu bangsa Indonesia dan menegara dalam wadah NKRI. Pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman yang diintegrasikan dengan program kesadaran bela negara.

Pendidikan politik bagi masyarakat melalui lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat merupakan bagian dari pembangunan nasional seutuhnya dalam menumbuhkembangkan sistem politik Indonesia yang sehat dan dinamis. Pembinaan politik harus dapat mewujudkan kondisi politik nasional yang kuat, yang tercermin dari pemerintahan yang kuat, serta dalam dimensi internasional berefek daya tangkal.

Pembangunan ekonomi nasional diarahkan bagi terwujudnya ekonomi rakyat sebagai tumpuan ekonomi nasional yang sehat dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Pembinaan ekonomi nasional harus



dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sudah dicapai serta pengendalian harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat sehingga kestabilan keamanan nasional dapat terjaga.



Pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang beraneka ragam dan bernilai tinggi merupakan kekayaan bangsa yang harus terus dipelihara dan dikembangkan. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui jaminan kebebasan beragama bagi setiap individu merupakan hak dasar insani setiap warga negara yang harus dihormati dan ditegakkan. Pembangunan agama juga harus dapat mencegah penyebaran aliran sesat dengan sedini mungkin dengan memberdayakan fungsi-fungsi penegakan hukum. Pengembangan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengapresiasi budaya-budaya lokal sebagai pembentuk budaya nasional dan melestarikannya melalui program aspek yang dilaksanakan secara konkret dan berkesinambungan.



## PENUTUP

### Perlakuan

- a. *Strategi Pertahanan Negara* ini adalah dokumen pemerintah di bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan yang dilindungi oleh undang-undang.
- b. *Strategi Pertahanan Negara* berlaku di lingkungan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, serta lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara.

### Petunjuk Akhir

- a. *Strategi Pertahanan Negara* digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan kebijakan pertahanan negara, pembangunan Postur Pertahanan Negara, serta strategi di lingkungan pertahanan militer.
- b. *Strategi Pertahanan Negara* menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Jakarta, 28 Desember 2007

Menteri Pertahanan

Juwono Sudarsono